

# **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI**

(Studi Pada Dinas Pertanian Kota Madiun)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**LILIK NURHAYATI**

**125030107111052**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Mochamad Makmur, Dr., MS**
- 2. Andy Kurniawan, S. AP, M. AP**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2016**

## MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila*

*engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetepilah bekerja keras*

*(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau*

*berharap*

(QS. AL-INSYIRAH,6-8)

**“ OJO RUMONGSO BISO, NANGING BISOHO RUMONGSO “**



# Lembar Persembahan

Kupersembahkan untuk,

Ayah dan Ibu tercinta,  
Mas ilham dan mbak dela..

Sahabat-sahabatku,  
Irfan, Anisa, Yunike, Lucia, Desy, Anggraeni,  
ajeng, fifi, sherly, nisa  
Kalian luar biasa...

Serta teman-teman angkatan 2012 Jurusan  
Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya Malang

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani  
(Studi Pada Dinas Pertanian Kota Madiun)

Disusun Oleh : Lilik Nurhayati

NIM : 125030101117052

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 22 November 2016

### Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



**Mochamad Makmur, Dr., MS**

**NIP. 19511028 198003 1 002**



**Andy Kurniawan, S.AP., M.AP**

**NIP. 2011078603201001**

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 13 Desember 2016  
 Jam : 09.00 – 10.00 WIB  
 Skripsi Atas nama : Lilik Nurhayati  
 Judul : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Madiun)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Mochamad Makmur, MS**  
 NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



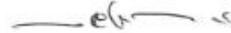
**Andy Kurhiawan, S.AP, M.AP**  
 NIP. 2011078603201001

Anggota



**Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, MPA**  
 NIP. 19750130 200312 1002

Anggota



**M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA**  
 NIP. 19740614 200501 1 001



## PERNYAATAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkannya oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi saya ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal (70)

Malang, 22 November 2016



Nama : Lilik Nurhayati

Nim : 125030107111052

## RINGKASAN

Lilik Nurhayati, 2016, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Madiun) Dibawah Bimbingan Dr. Mochamad Makmur, MS dan Andy Kurniawan, S.AP, M.AP

---

---

Pemberdayaan pada gabungan kelompok tani mampu menunjang pembangunan pertanian di Kota Madiun. Namun masih rendahnya pendidikan sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu di perlukan peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Kota Madiun dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Kota Madiun melalui peningkatkan kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: 1) pembinaan sumberdaya manusia 2) pembinaan usaha 3) pembinaan lingkungan 4) pembinaan kelembagaan 5) faktor pendukung dan penghambat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini Dinas Pertanian Kota Madiun telah berperan aktif dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani. Pembinaan sumberdaya manusia dilakukan melalui pendekatan latihan dan kunjungan (LAKU). Pembinaan usaha dilakukan dengan diarahkan pada pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat pengembang usaha bisnis (PUAP). Pembinaan lingkungan dilakukan dengan melakukan program pengelolaan hama terpadu (PHT). Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan diarahkan untuk mengurus status Badan Hukum Indonesia. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah dan telah terbentuknya gabungan kelompok tani. Faktor penghambat sumberdaya petani yang sebagian masih berpendidikan rendah dan semakin berkurangnya luas lahan sawah.

Kesimpulan Dinas Pertanian Kota Madiun telah berperan aktif dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani yaitu dengan adanya latihan dan kunjungan bagi petani, adanya pengelolaan dana, pengelolaan hama terpadu serta dinas pertanian Kota Madiun telah mengarahkan gabungan kelompok tani untuk berbadan hukum agar legal dalam bekerja dan kuat dalam meyongsong perdagangan bebas. Rekomendasi penulis, dinas pertanian Kota Madiun perlu memberikan perhatian lebih pada sumberdaya Gapoktan serta pemerintah harus menekan alih fungsi lahan sawah dengan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan lingkungan hidup.

Kata kunci: Peranan Pemerintah, Pemberdayaan, Gabungan Kelompok Tani

## SUMMARY

Lilik Nurhayati, 2016, The Role of Local Government in the Empowerment of Farmer Group (Studies in the Agency of Agriculture, Madiun) under the guidance of Dr.Mochamad Makmur, MS and Andy Kurniawan, S.AP., M.AP

---

The empowerment of farmer group is able to support agricultural development in the city of Madiun. However, the low level of human resources' education is become the obstacle. Therefore, it is necessary to empower the role of Local Government in optimizing natural and human resources in the Madiun city in order to increase productivity and food resilience. One of the many steps that can be done by the government is through improving the welfare of the community empowerment.

This research aimed to describe and analyze the role of local government in empowering farmer group as well as supporting factors and obstacles. This research uses descriptive method with qualitative approach. The focus of this research are: 1) development of human resources 2) business coaching 3) development of environment 4) development of institutional 5) supporting and inhibiting factors. Data collection technique used were interview, observation, and documentation.

Results of this research is the Agency of Agriculture of Madiun has been active in farmer group empowerment. The coaching of human resources is done through training and visit approach (LAKU). Business coaching aimed at the management of direct grants of business venture developer (PUAP). Environmental development is done by the program management of integrated pest management (PHT). Development of institutional aimed to managed Indonesian Legal Entity status. The supporting factors are that there is a bolster from the government and the farmer group already formed. The obstacles are most of farmers still in low level of education and the reduction in paddy fields.

The conclusion is Agency of Agriculture of Madiun has an active role in the empowerment of farmer group. This was proved by the existence of training and farmers' visit and their assistance to fund management. Integrated Pest Management as well as the Agency of Agriculture of Madiun has directed farmer group to a legal entity in order to have a legitimate work and become stronger in facing the free trade. Author's recommendation is that the Agency of Agriculture of Madiun necessary to provide more attention to the farmer group and the government should be able to push over the paddy field function with policies that prioritize the environment.

Keyword: The Role Of Government, Empowerment, Farmer Group

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Madiun)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan baik segi penyampaian materi maupun penituran bahasanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

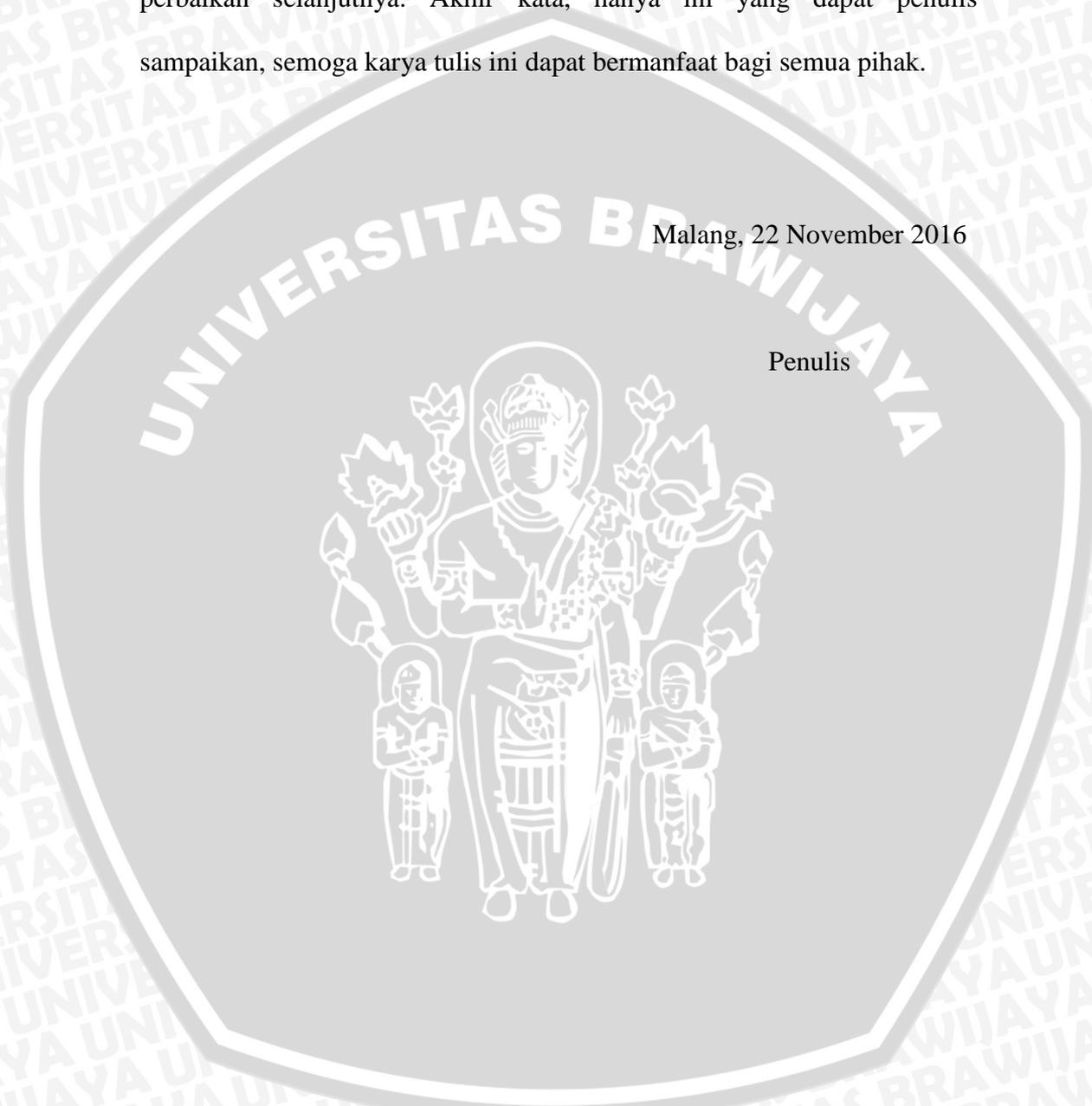
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochammad Makmur, MS. Selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Bapak Andy Kurniawan, S. AP, M. AP Selaku Anggota Komisi Pembimbing.

6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staff/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Pegawai Dinas Pertanian Kota Madiun beserta seluruh jajaran dan staff yang telah memberikan kesempatan dan membantu kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tuaku, Bapak Harijadi dan Ibu Ni Ketut Wiryati, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku Ilham Mustafa dan Calon Kakak iparku Dela Rosita yang telah memberikan kasih sayang selama ini.
11. Irfan Oktyansyah laki-laki tersabar yang selalu memberi motivasi, doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku: Anisa, Yunike, Lucia, Desy, Anggraeni yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya selama ini.
13. Kakak cantik: ajeng, fifi, sherly, nisa teman dari jaman maba sampai jadi mahasiswa tua, kalian luar biasa. Teman yang selalu membantu penulis ketika penulis menemui kesulitan dalam menyelesaikan skripsi.
14. Anak kos 21 : anes, devi, nana dan rere yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Akhir kata, hanya ini yang dapat penulis sampaikan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 22 November 2016

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Publik	
1. Pengertian Administrasi .....	12
2. Pengertian Publik .....	13
3. Pengertian Administrasi Publik .....	14
B. Konsep Pelayanan	
1. Pengertian Pelayanan Publik .....	17
2. Pengertian Pelayanan Publik Yang Berkualitas .....	18
3. Peran Pemerintah Daerah .....	20
4. Fungsi Pemerintah Daerah .....	26
C. Pemberdayaan Masyarakat	
1. Definisi Pemeberdayaan Masyarakat .....	29
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	29
3. Tujuan Pemberdayaan .....	31
4. Indikator Pemberdayaan .....	33
5. Ruang Lingkup Pemberdayaan .....	34
6. Pemberdayaan Petani .....	36
D. Gabungan Kelompok Tani	



1. Pengertian Gabungan Kelompok Tani .....	40
2. Karakteristik Gabungan Kelompok Tani .....	41

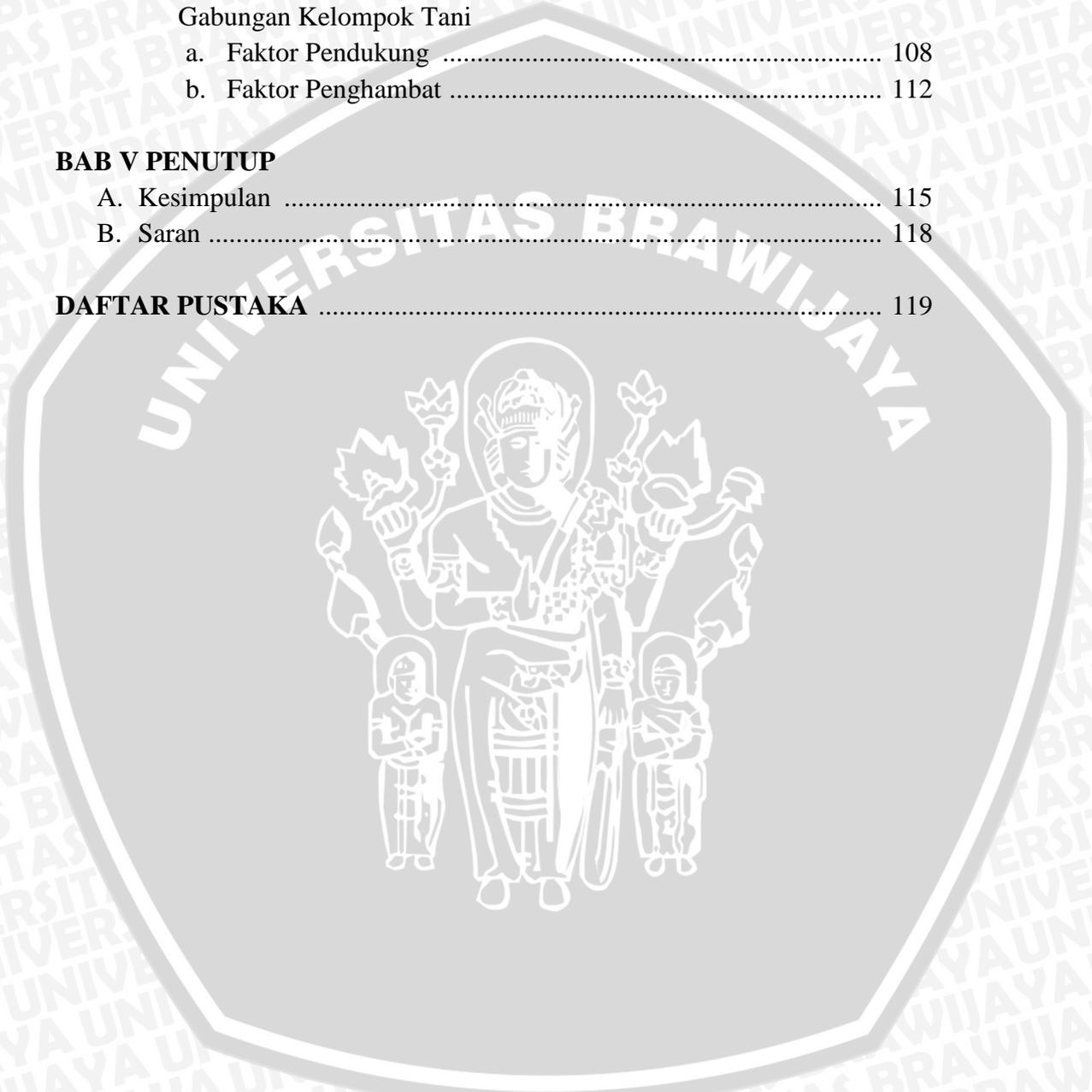
### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian .....	44
C. Lokasi Dan Situs Penelitian .....	46
D. Sumber Dan Jenis Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Analisis Data .....	53

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Madiun .....	56
a. Letak Geografis Kota Madiun .....	56
b. Demografi .....	57
c. Pembagian Administrasi Kota Madiun .....	58
d. Visi Dan Misi Kota Madiun .....	58
2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Madiun .....	59
a. Gambaran Dinas Pertanian Kota Madiun .....	59
b. Visi Dan Misi Dinas Pertanian Kota Madiun .....	60
c. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Madiun .....	61
d. Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Madiun .....	62
e. Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Madiun .....	63
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani	
a. Pembinaan Sumberdaya Manusia .....	64
b. Pembinaan Usaha .....	67
c. Pembinaan Lingkungan .....	72
d. Pembinaan Kelembagaan .....	76
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani	
a. Faktor Pendukung .....	88
b. Faktor Penghambat .....	93
C. Pembahasan Dan Analisis Data	
1. Peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani	
a. Pembinaan Sumberdaya Manusia .....	96

b. Pembinaan Usaha .....	98
c. Pembinaan Lingkungan .....	100
d. Pembinaan Kelembagaan .....	103
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani	
a. Faktor Pendukung .....	108
b. Faktor Penghambat .....	112
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	118
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>



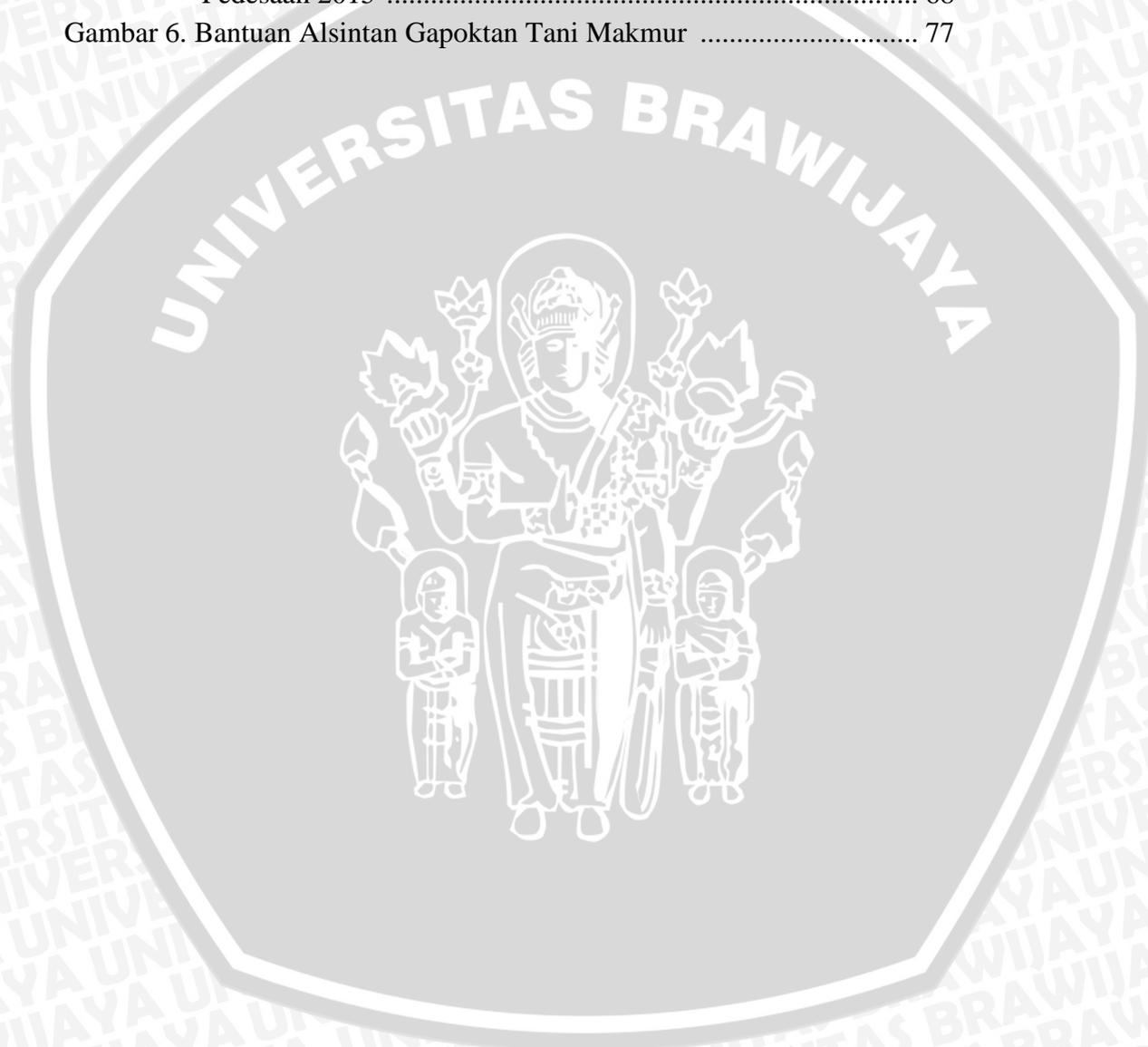
### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Luas Baku Sawah Kota Madiun .....	5
Tabel 2. Data Pemanfaatan Lahan Sawah Kota Madiun .....	6
Tabel 3. Sumberdaya Manusia/ Pegawai Dinas Pertanian .....	63
Tabel 4. Rekap Penerima Dana Pengembang Usaha Agribisnis Pedesaan .....	69
Tabel 5. Daftar Gapoktan Kota Madiun .....	80



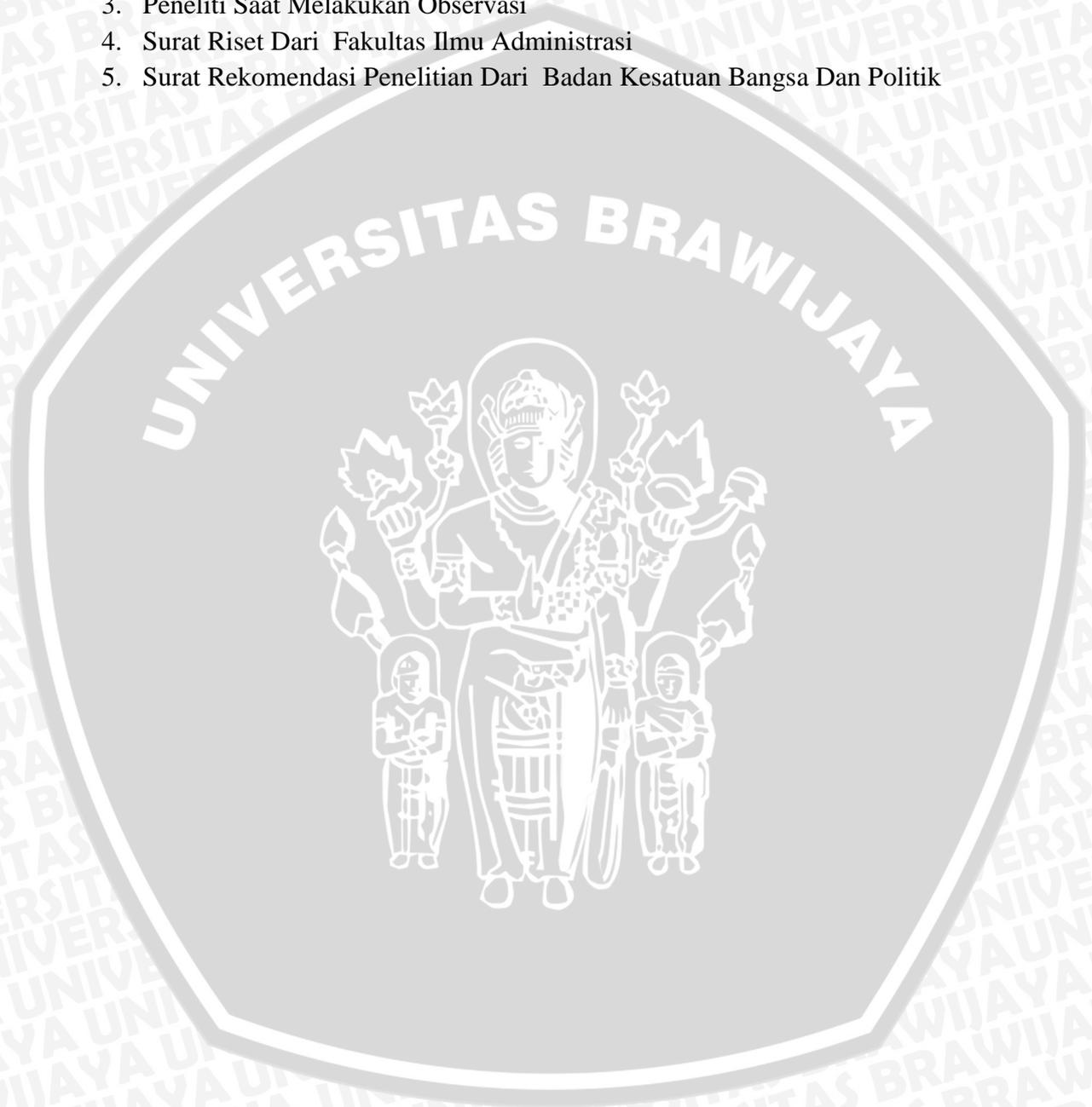
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Componen Of Data Analysis (Interactive Model) .....	54
Gambar 2. Peta Kota Madiun .....	56
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Madiun .....	61
Gambar 4. Penyuluhan Dan Pelatihan Pengelolaan Lahan Sawah .....	66
Gambar 5. Pelatihan Gapoktan Penerima Pengembang Usaha Agribisnis Pedesaan 2015 .....	68
Gambar 6. Bantuan Alsintan Gapoktan Tani Makmur .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Untuk Dinas Pertanian
2. Daftar Pertanyaan Untuk Gabungan Kelompok Tani
3. Peneliti Saat Melakukan Observasi
4. Surat Riset Dari Fakultas Ilmu Administrasi
5. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu perubahan menuju kearah kondisi yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan disektor pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Guna mencapai tujuan tersebut kegiatan pembangunan pertanian menuntut termafaatnya seluruh potensi yang ada dimasyarakat, baik potensi sumberdaya alam, manusia, teknologi dan juga sumber daya intitusi secara optimal. Oleh karena itu pembangunan pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat petani.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik presentasi penduduk miskin 2015 mencapai 11,22 persen atau mencapai

28,59 juta orang, bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi penduduk miskin pada 2014 yang sebesar 10,96 persen atau 27,73 juta orang. Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada 2015. Sementara presentasi penduduk miskin di pedesaan naik 13,76 persen pada 2014 menjadi 14,21 persen pada 2015. Selama periode 2014-2015 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang, sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (BPS,2015).

Berdasarkan data diatas kenaikan presentase kemiskinan yang mencangkup penduduk yang tinggal didaerah pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian sangat jauh dari harapan jika melihat bahwa indonesia merupakan negara agraris. Indonesia merupakan negara agraris namun masih kurangnya dalam berkontribusi pada sektor pertanian sehingga terjadi kenaikan persentase kemiskinan yang salah satu penyumbangya adalah sektor pangan dan pertanian. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan pemeberdayaan masyarakat.

Pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dipisahkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Misalnya telah mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional (Suharto,1997). PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang

terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu intitusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan permasalahan sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto,2014)

Berkaitan dengan kutipan diatas, kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Selain itu dalam kehidupan masyarakat pasti tidak akan terlepas dari peran pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi mengatur serta mengurus tatanan pemerintahannya sendiri. Sejalan dengan diberlakukannya otonom daerah dimana pemerintah daerah di berikan wewenang yang diarahkan pada peran pemerintah dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan. Melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah pusat telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung roda pemerintahan. Mengenai

kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah adalah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yang paling menonjol terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan, Sulistiyani (2004:97). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain, formulasi, penetapan kebijakan, implementasi, pengawasan, evaluasi dan mediasi.

Selanjutnya Sulistiyani menegaskan tentang peran pemerintah:

“peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun batasan-batasan normatif lain. Disamping itu fasilitas dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil dan lain-lain.”

Sehingga peran pemerintah daerah dalam pembangunan menjadi besar, karena daerah telah diberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting dalam mengatur urusan daerah.

Areal sawah Kota Madiun berada ditiap kelurahan yang masih berpotensi dan memiliki lahan sawah menyebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kartoharjo seluas 403 ha, Kecamatan Manguharjo seluas 371 ha dan Kecamatan Taman seluas 281 ha, sehingga total lahan sawah Kota Madiun 1055 ha. Lahan tersebut untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan. Lahan sawah tahun 2014 yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan seluas 880 ha dan untuk tanaman perkebunan 156 ha, serta lahan tegalan seluas 19 ha (Dinas Pertanian 2014). Hasil sektor

pertanian di Kota Madiun terdiri dari Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunandan Subsektor Kehutanan. Menurut data statistik 2013 mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di kota Madiun sebanyak 2.353 rumah tangga, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 7 perusahaan, dan jumlah non-rumah tangga usaha pertanian sebanyak 1 unit. (BPS.Kota Madiun 2013)

Tabel.1 Data Luas Baku Sawah Kota Madiun

No	Kecamatan	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014	Th 2015
1	Kartoharjo	406 Ha	406 Ha	406 Ha	403 Ha	403 Ha
2	Manguharjo	376 Ha	376 Ha	376 Ha	371 Ha	371 Ha
3	Taman	285 Ha	285 Ha	285 Ha	281 Ha	281 Ha
	<b>Kota Madiun</b>	<b>1.067 Ha</b>	<b>1.067 Ha</b>	<b>1.067 Ha</b>	<b>1.055 Ha</b>	<b>1.055 Ha</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kota Madiun, 2015

Pembangunan pertanian di Kota Madiun merupakan bagian dari pembangunan pertanian secara nasional maupun regional serta merupakan bagian pembangunan kota madiun dalam rangka peningkatan prduktivitas ketahanan pangan. Pada sektor pertanian kota Madiun, hasil tanaman pangan berupa padi dan kacang kedelai. Sedangkan pada sektor perkebunan, adalah tebu.

Tabel.2 Data Pemanfaatan Lahan Sawah Kota Madiun

No	Kecamatan	Padi	Palawija	Tebu
----	-----------	------	----------	------

1	Kartoharjo	1.079 Ha	73 Ha	14 Ha
2	Manguharjo	819 Ha	96 Ha	52 Ha
3	Taman	675 Ha	- Ha	54 Ha
	<b>Kota Madiun</b>	<b>2,573 Ha</b>	<b>169 Ha</b>	<b>120 Ha</b>

**Sumber: Dinas Pertanian Kota Madiun, 2015**

Pemanfaatan potensi daerah perkotaan dalam menunjang pembangunan pertanian diarahkan pada pemilihan komoditif yang mampu bersaing di pasaran, menunjang penghijauan kota, kelestarian lingkungan hidup, memantapkan kelembagaan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kontak tani nelayan andalan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan usaha agribisnis. Mengingat areal pertanian kota madiun yang semakin menyempit karena terjadinya alih fungsi lahan, secara logis akan berpengaruh pada kemampuan berproduksi, oleh karena itu diperlukan dukungan berupa SDM yang berkualitas untuk melaksanakan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan (Dinas pertanian 2014). Latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkualitasnya sumber daya manusia, rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan petani sulit untuk diajak berfikir maju. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pertanian yaitu kurangnya inovasi, kurangnya optimalisasi teknologi dan pengetahuan dalam bidang pertanian sehingga masyarakat petani belum mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu di perlukan peranan

Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Kota Madiun dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Kota Madiun melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan, pendapatan, akses dan sarana yang ada dalam sekelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang ke arah yang lebih maju. Menurut Kartasmita dalam Mashoed (2004:79) pemberdayaan masyarakat itu harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang,
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana maupun prasarana fisik dan sosial yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah,
- c) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Maka dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasmita dalam Mashoed (2004:79) melalui tiga cara pemberdayaan masyarakat mencakup bagaimana masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih maju melalui penguatan potensi dan

menyediakan sarana maupun prasarana fisik dan sosial yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat bawah.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan penekanan pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani. Penelitian ini di fokuskan pada organisasi pertanian seperti gabungan kelompok tani yang sudah aktif cukup lama dan tentunya mendapatkan program pemberdayaan dari Dinas Pertanian Kota Madiun yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat petani. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada keterlibatan peran pemerintah Kota Madiun dalam proses pemberdayaan gabungan kelompok tani di Kota Madiun. Gabungan Kelompok Tani Kota Madiun merupakan salah satu dari perkumpumpulan masyarakat petani yang memiliki fokus dalam bidang pertanian dan mendapatkan program dari pemerintahan dalam pemberdayaan yang menarik untuk di teliti. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas serta menimbang peran pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan pemberdayaan Gabunngan Kelompok Tani dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian tentang **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Madiun)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka permasalahan yang akan di ungkap dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Medeskripsikan, dan menganalisis peranan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani.
2. Medeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani

## **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Secara akademis hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Publik
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Madiun dan instansi yang terkait

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kontribusi penelitian secara akademis dan praktis dari hasil penelitian

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data yang didapat dari lapangan

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

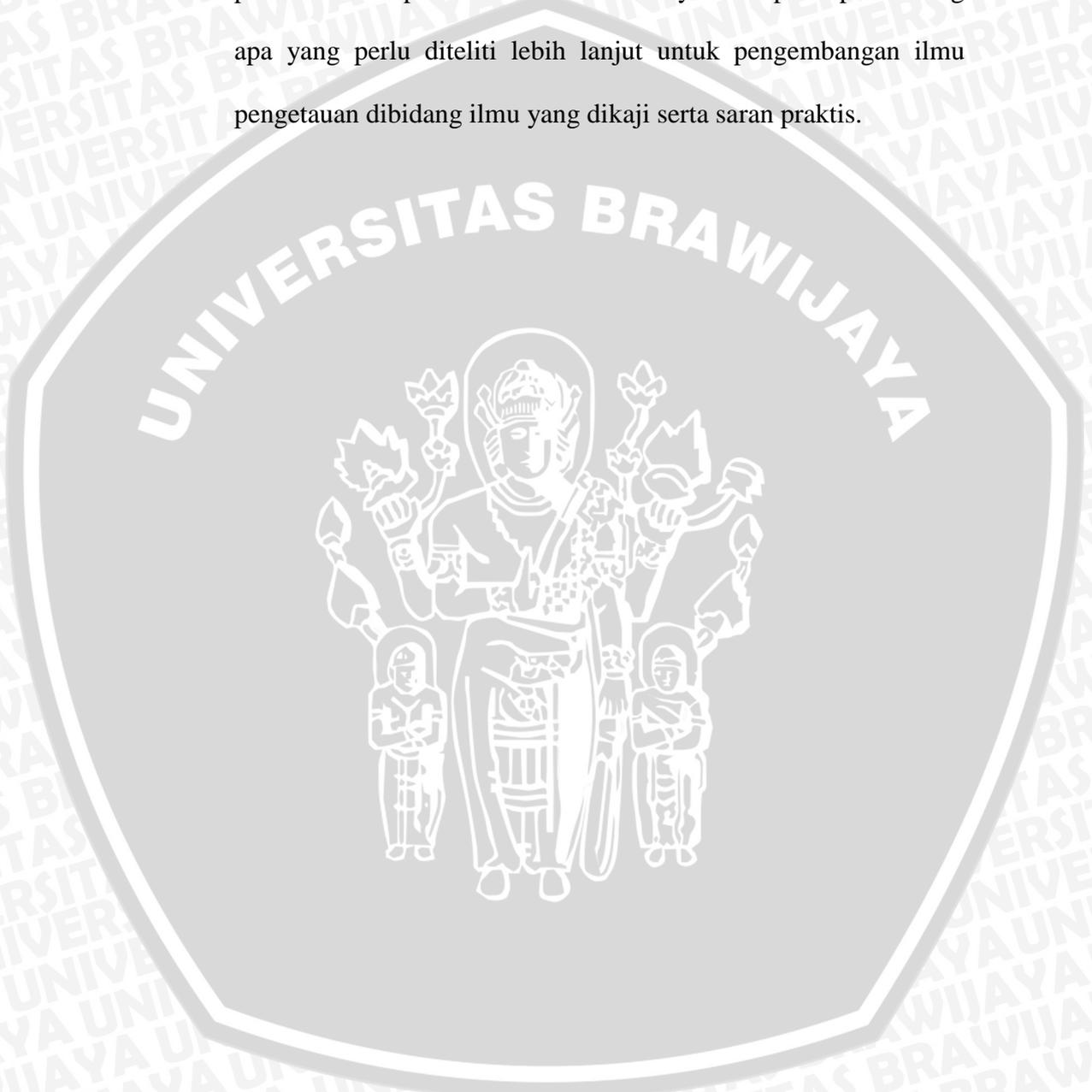
Pada bab ini metode-metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Beirisi tentang penguaraian secara umum dan mendalam tentang konteks dan sasaran penelitian berupa objek dan lokasi penelitian yang tersangkut dengan masalah yang diteliti. Pembahasan yaitu mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil penelitian, mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penelitian.

## BAB V: PENUTUP

Kesimpulan menyatakan temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Saran menyatakan pendapat tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu yang dikaji serta saran praktis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi

Ilmu administrasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran manusia bahwa setiap usaha bersama untuk mencapai tujuan baik pemerintahan, bisnis maupun kegiatan masyarakat sangat membutuhkan administrasi untuk merelisasikan tujuannya. Menurut Herbert A. Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D. White dalam Inu kencana syafie dkk. (1999), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dimock & Dimock (1992:20), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Selanjutnya menurut S. P. Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (1993:9),

mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kebersamaan dua orang atau lebih yang telah bersepakat dengan tujuan-tujuan yang telah disepakati. Sehingga dapat menghasilkan proses yang sistematis dan struktural dalam mencapai tujuan bersama.

## 2. Pengertian Publik

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Secara konseptual cakupan “state” lebih luas daripada “publik”. Menurut Syafiie dkk. (1999:18) dalam pasolong, mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Ini berarti bahwa publik itu mencakup secara keseluruhan tentang rakyat dan kepentingan umum. Selanjutnya menurut H. George Frederickson (1997:46) dalam pasolong, menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif, yaitu

- a) publik sebagai kelompok kepentingan yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,

- b) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,
- c) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik di wakili suara.
- d) publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan
- e) publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai suatu yang paling penting.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa publik merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga publik itu dapat dikatakan mencakup orang banyak atau masyarakat umum.

### **3. Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan bentuk aksi dari pemerintahan atau sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui

perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditunjukkan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960:4), mendefinisikan administrasi publik, adalah

- a) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik,
- b) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Selanjutnya menurut Nicholas Henry (1988) dalam pasolong, mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. David H. Rosenbloom (2005) menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Administrasi publik merupakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik melalui perbaikan sumberdaya manusia, organisasi dan keuangan secara efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga administrasi publik dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan gabungan kelompok tani karena pemberdayaan merupakan tugas dari pemerintah.

## **B. Konsep Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian pelayanan publik**

Pelayanan publik menurut sinambela (2005:5) dalam pasolong adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yaitu kegiatan seseorang atau sekompok orang atau organisasi yang memberikan suatu penawaran kepuasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan.

Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam kaitannya dengan pelayanan publik, Osborne dalam pasolong menyimpulkan 10 prinsip yang disebut sebagai keputusan gaya baru.

Kesepuluh prinsip yang dimaksud Osborne (1997) dalam pasolong adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh.
- b. Pemerintah milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani
- c. Pemerintah yang kopetitif: menyuntikan persaingan kedalam pemberian pelayanan.
- d. Pemerintah yang digalakan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan
- e. Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan.
- f. Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi
- g. Pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan
- h. Pemerintah antisipatif: mencegah daripada mengobati
- i. Pemerintah desentralisasi
- j. Pemerintah birokrasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.

## **2. Pengertian pelayanan yang berkualitas**

Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian memberikan suatu penawaran kepuasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah di tentukan. Sinambela

(2006:6) dalam Pasolong mengemukakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

- a. Transparansi
- b. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- c. Akuntabilitas
- d. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kondisional
- f. Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas.
- g. Partisipatif
- h. Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- i. Kesamaan hak
- j. Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial.
- k. Keseimbangan hak dan kewajiban
- l. Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik

### 3. Peran Pemerintah Daerah

Di dalam menjalankan desentralisasi pemerintah daerah memiliki peran penting, terutama dalam pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal yang ada didaerahnya sehingga dapat mewujudkan pembangunan ekonomi lokal. Muluk (2009:111) menjelaskan bahwa pandangan tradisional tentang peran pemerintah daerah mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, *Wealth of Nation*, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan inovasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pendapat ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya terbatas pada pertahanan, pengadilan dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal ini tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Akan ada *equilibrium* yang merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran sehingga setiap pihak akan mencapai kepuasan maksimum.

Pemerintah daerah berperan dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan

dengan unsur lain di luarnya. Dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett & Ramesh (1995) maka dapat dibedakan tiga kategori, yakni instrumen wajib (*compulsory instruments*), instrumen campuran (*mixe instrument*), dan instrumen sukarela (*voluntary instrument*) (Muluk (2009:114) .

Pemerintah daerah memainkan dan memegang peranan penting dalam mengatur sebuah negara. peran pemerintah daerah dijelaskan oleh Howlett & Ramesh (1995) dalam Muluk (2009:114-117) bahwa instrumen wajib atau sering disebut sebagai instrumen yang mengarahkan bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu (*regulations*), atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih (*public-owned enterprise*), atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi (*direct public goods privision*). Instrumen wajib ini merupakan instrumen yang bersifat memaksa karena memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjalankan apapun yang dikehendaknya dalam koridor konstitusi yang luas ruang lingkupnya. Sehingga penggunaan instrumen ini sering kali justru membatasi ruang gerak pihak lain, seperti individu, kelompok, ataupun organisasi diluar pemerintah. Instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada

kesukarelaan. Instrumen ini berupa organisasi non pemerintah yang berbasis sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintahan. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Terdapat tiga jenis instrumen yang dapat dikategorikan sebagai instrumen sukarela, yaitu keluarga dan masyarakat, organisasi sukarela, dan pasar. Organisasi ini dapat bergerak diluar hambatan negara dan ekonomi. Organisasi ini memiliki fleksibilitas dan kecepatan dalam beraksi atas masalah tertentu, dan memiliki peluang bereksperimen yang sulit dilakukan oleh organisais pemerintah. Kategori instrumen yang ketiga adalah instrumen campuran yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor non pemerintah, sekaligus membiarkan keputusan akhir berada ditangan aktor tersebut. Keterlibatan pemerintah ini berkisar dari yang paling kecil berupa penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak seperti pemungutan pajak dan redistribusi.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Dimana tugas pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Beberapa peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan (Siagian, 2001:142-149), antara lain :

a. Selaku Stabilisator

1. Stabilisator bidang politik

Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar negeri. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara kekuatan politik, apalagi yang didasarkan pada perbedaan ideologi politik yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan dari luar biasanya datang dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin memantapkan pengaruh dan bahkan memperluas hegemoninya. Artinya ingin agar lingkungan berpengaruh semakin melebar yang antara lain berupa panutan ideologi dan sistem politik yang berlaku di negara kuat tersebut yang diinginkan agar diterapkann di lingkungan makin banyak negara yang akan diakui sebagai sekutunya. Kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas politik.

2. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga: (a) ekonomi tumbuh secara wajar, (b) suku bunga yang tidak tinggi, (c) rendahnya inflansi, (d) kesempatan berusaha semakin luas, (e) proses industrialisasi berlangsung dengan baik, (f) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi perekonomian yang sering dihadapi oleh negara terbelakang dan negara berkembang justru adalah kebalikan dari ciri-ciri diatas. Oleh karena itu, para pakar dan pengamat ekonomi sering menekankan bahwa ada lima hal yang menonjol yang menjadi alasan mengapa stabilitas ekonomi sering terganggu di negara-negara miskin dan sedang membangun. Pertama, jiwa kewirausahawanan dikalangan warga tidak tinggi. Kedua, ketrampilan atau kemahiran manajerial dibidang bisnis rendah, yang sesungguhnya merupakan “produk sampingan”. Ketiga, produktivitas tenaga kerja yang rendah, bukan hanya karena ketrampilan operasional yang kurang, akan tetapi juga etos kerja yang tidak tepat, ketidakdisiplinan mengenai waktu, ketidakcermatan melaksanakan tugas dan loyalitas yang tinggi

kepada diri sendiri tetapi tidak kepada organisasi. Keempat, keturunan para pendatang yang bermigrasi beberapa generasi yang bermigrasi beberapa generasi yang lalu yang memiliki jiwa wirausahawan, memiliki modal, memiliki ketrampilan manajerial dan mau bekerja keras. Kelima, di negara-negara terbelakang dan sedang membangun para warga masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai “kelas menengah” tidak banyak padahal merekalah yang sesungguhnya yang menjadi tulang punggung bangsa.

### 3. Stabilitas Sosial Budaya

Pemerintah diharapkan mampu menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa pembangunan sosial-budaya seolah-olah mengandung dilema arena disatu pihak ada unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan, akan tetapi dilain pihak bangsa yang bersangkutan harus siap menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Mempertahankan jati diri memang sangat penting karena dalam jati diri itulah kekhasan suatu bangsa diketahui, dikenali dan diakui oleh pihak atau bangsa lain. Sehingga terlihat peran pemerintah sebagai stabilitator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain (a) kemampuan selektif yang tinggi, (b) proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, (c) melalui pendidikan, (d) pendekatan yang persuasif, dan (e) pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh kedepan” (*quantum leap*).

#### b. Selaku Inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Disamping keabsahan, ada tiga hal lain yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu *Pertama*. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Inovasi akan dapat merubah semua tuduhan yang dilemparkan masyarakat kepada aparat pemerintah karena aparat pemerintah mampu bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan dan cara berpikir yang didasarkan pada pelayanan. Jika pemerintah mampu mewujudkan birokrasi yang demikian, cara-cara berinovasi yang ditawarkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima.

*Kedua.* Inovasi yang sifatnya konseptual. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Suatu hak yang menonjol dalam kaitannya ini menyangkut apa yang secara tradisional dalam administrasi negara dikenal sebagai “netralitas” birokrasi. Dengan pandangan demikian, birokrasi sering menempatkan diri semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan politik yang diambil oleh institusi yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengambilnya tanpa mempersoalkan, apalagi menganalisis, apakah keputusan politik yang diambil itu demi kepentingan rakyat banyak atau tidak.

*Ketiga.* Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Kesemuanya itu berarti sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “problem-solving” dan “action-oriented”. Yang dimaksud dengan pendekatan demikian ialah kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga “terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga akarnya.

c. Selaku Modernisator

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang handal, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, dan pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, progamatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk “menggiring” masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Sehingga proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

d. Selaku pelopor

Pemerintah harus memainkan peranan selalu pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan (“role model”) bagi seluruh masyarakat. Misalnya : kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal pemberantasan korupsi dan kolusi, kepeloporan dalam penegakkan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku, kepeloporan dalam ketaatan

kepada peraturan perundang-undangan, kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara seperti dalam hal bela negara dan pajak, kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, kepeloporan dalam penerapan objektivitas, kepeloporan dalam peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros, serta kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

e. **Selaku Pelaksana Sendiri**

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan kerja, modal yang terbatas kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusioanal memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah,

Sebagaimana fungsi pemerintah tersebut sebagai stabilitator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi pemerintah harus terjalin secara kesinambungan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik. dengan adanya kesinambungan, maka pemerintah akan mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam pencapaian tujuan negara.

#### **4. Fungsi Pemerintah Daerah**

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi yang lebih kompleks. Musgrave dan Musgrave (1991) dalam Muluk (2009:113)

mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi Alokasi,

Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan dengan baik sebagai *private* maupun *public goods*, dan menentukan komposisi dari *public goods*. Selain itu, fungsi alokasi dapat menggunakan fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hanya negara yang bisa “memaksa” golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

c. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dan mempertimbangkan dampaknya bagi perdagangan dan keseimbangan pembayaran.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut maka pemerintah diharapkan lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan serta mencapai tujuan negara. Lebih lanjut fungsi pemerintah dimana setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara ini mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Adapun fungsi pemerintahan dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi pokok (Kurniawan, 2005:3-4), yaitu

- a. Fungsi Pengaturan yang dilaksanakan dalam membuat peraturan yang mengatur hubungan dalam masyarakat, dimana pemerintah merupakan pihak yang dapat melakukan dan menerapkan peraturan agar kehidupannya dapat berjalan secara baik dan dinamis, serta memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan, tanpa melupakan peran swasta dan aparatur pemerintah sendiri.
- c. Fungsi pelayanan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus upaya penciptaan keadilan ditengah masyarakat.

Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif, karena suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijakan. Berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijakan tersebut dapat merupakan pemberian dan perluasan kesempatan bagi masyarakat melakukan kegiatan tertentu, tetapi dapat pula berupa pembatasan jika diyakini bahwa pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun, berbagai kebijakan yang bersifat membatasi itu perlu dirumuskan dan ditentukan dengan sangat hati-hati agar jangan sampai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan berbagai pihak lain, serta tetap menjamin terlindunginya hak asasi para warga negara.

### **C. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Definisi Pemberdayaan masyarakat**

Banyak sekali definisi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli. Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan, pendapatan, akses dan sarana yang ada dalam sekelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang ke arah yang lebih maju. Menurut Kartasmita dalam Mashoed (2004:79) pemberdayaan masyarakat itu harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang,

- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana maupun prasarana fisik dan sosial yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah,
- c) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Maka dapat disimpulkan pembedayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasmita dalam Mashoed (2004:79) melalui tiga cara pemberdayaan masyarakat mencakup bagaimana masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih maju melalui penguatan potensi dan menyediakan sarana maupun prasarana fisik dan sosial yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat bawah.

Menurut Sa'adah, 2015:38 pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat. Menurut Payne dalam Maharani dalam Sa'adah (2015:39) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam

melakukan tindakan. Makna pemberdayaan menurut Yunani menurut Sa'adah (2015:39) adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan riilnya dengan usaha dan kemampuan masyarakat sendiri, melalui indikator ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan ketrampilan-ketrampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang berkerja berdasarkan agenda bersama menurut (Suharto, 2010 dalam Sa'adah 2015:39).

## **2. Konsep Pemberdayaan masyarakat**

Konsep pemberdayaan masyarakat lahir karena adanya model pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat. Akhirnya tercipta masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang lemah. Masyarakat berkuasa menguasai masyarakat yang lemah. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul. Ini adalah konsep untuk mencegah adanya ketidakadilan antara masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang lemah. Pemberdayaan ini menghasilkan power dengan pembagian kesejahteraan. Mencegah

keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul akibat proses pembangunan yang tidak berjalan dengan baik.

Dengan kata lain pemberdayaan memberikan daya kepada masyarakat agar bisa mandiri dan berdaya saing tinggi. Mendorong individu agar dapat berinovasi dan mengembangkan kemampuan diri agar tidak tertindas oleh pemilik kepentingan yang tidak berpihak kepada masyarakat lemah. Konsep ini diarahkan terhadap potensi sumber daya manusia di pedesaan yang nantinya bisa menciptakan peluang usaha kecil bagi rakyat sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Menurut Kartasmita (1997:55) konsep pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan, dan berkelanjutan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu”.

Dengan melihat konsep pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita (1997:55) maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebuah konsep yang mengacu pada pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Fokusnya lebih kepada masyarakat yang meliputi partisipasi, pembinaan yang bersifat berkelanjutan. Pandangan dari konsep ini lebih luas bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar tetapi lebih dikembangkan, mencari alternatif pada konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

### 3. Tujuan Pemberdayaan

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Demikian pula halnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan. Menurut Soleh (2014:81-82) terdapat tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya.
- b. Untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut maka terdapat beberapa tujuan atau sasaran antara lain
  - 1) Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui perbaikan kelembagaan berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
  - 2) Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
  - 3) Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan.
  - 4) Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi teknologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam proses produksi.
  - 5) Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat.
  - 6) Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing.

- 7) Perbaikan-perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

#### 4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan, pendapatan, akses dan sarana yang ada dalam sekelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang ke arah yang lebih maju. Dalam pemberdayaan masyarakat tentunya ada indikator untuk memberikan petunjuk atau keterangan sebagai acuan untuk menilai. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005:63) mengembangkan delapan indikator dalam pemberdayaan yaitu:

- a) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu pergi sendirian
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, dan lain-lain). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut sendiri dengan menggunakan uangnya sendiri
- c) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha
- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam suatu tahun terakhir ada seseorang (suami,

istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah

- f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kelurahan; seorang anggota DPRD setempa; nama presiden; mengetahui pentingnya surat nikah dan hukum-hukum waris
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat kampanye atau bersama orang lain melakukan protes misalnya, terdapat suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintahan
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset; produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara mandiri atau terpisah dari pasangannya.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal ( misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat di kategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing
- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.

Dengan delapan indikator pemberdayaan yang telah di kemukakan Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005:63) maka delapan

indikator pemberdayaan tersebut dapat di jadikan acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pemberdayaan. Oleh sebab itu indikator pemberdayaan sangat penting dalam hal untuk memberikan penilaian. Dengan adanya penilaian melalui indikator-indikator, pemberdayaan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama.

## 5. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Ruang lingkup pemberdayaan digunakan sebagai batasan apa saja yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat. Adapaun ruang lingkup pemberdayaan menurut Soleh (2014:86-89), yaitu :

### a. Bina Manusia.

Bina manusia merupakan upaya pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : (a) pengembangan kapasitas individu, (b) pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, (c) pengembangan kapasitas sistem (jejaring)

### b. Bina Usaha.

Bina usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Terdapat kegiatan pemberdayaan yang berkaitan bina usaha antara lain pemilihan komoditas dan jenis usaha; studi kelayakan dan perencanaan bisnis; pembentukan badan usaha; perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan; pengelolaan SDM dan pengembangan karir; manajemen produksi dan operasi; manajemen logistik dan finansial; penelitian dan pengembangan; pengembangan dan pengelolaan informasi bisnis;

pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

c. Bina Lingkungan

Bina lingkungan merupakan upaya penting dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan masalah lingkungan dipandang sangat penting dalam proses pembangunan. Sehingga bina lingkungan diharapkan mampu melakukan pelestarian lingkungan alam.

d. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan merupakan salah satu upaya penting dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun terdapat prinsip kelembagaan yang terdiri dari (a) adanya sekelompok orang yang dapat diidentifikasi dengan jelas, (b) adanya tujuan yang akan dicapai, yang membuat mereka saling bekerja sama/berinteraksi (c) adanya aturan yang ditaati dan mengikat mereka dalam berinteraksi/bekerja sama, (d) adanya struktur organisasi, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus mereka jalankan sesuai aturan yang telah ditentukan.

## 6. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1). Menurut UU No 19 Tahun 2013 pasal 40 pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan

pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Kualitas sumber daya petani akan mempengaruhi bagaimana produktivitas yang dihasilkan. Menurut Soedijanto (2003) dalam Sadono (2008:69) menyatakan bahwa mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang manakala penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan, bukan proses transfer teknologi. Menyuluh bukannya “mengubah cara bertani” melainkan “mengubah petani” melalui enam dimensi belajar (learning) yaitu :

- a. Learning to know (penguasaan konsep, komunikasi informasi, pemahaman lingkungan, rasa senang memahami, mengerti dan menemukan sesuatu)
- b. Learning to do (penekanan pada skill tingkat rendah ke tingkat tinggi menuju arah kompetensi)
- c. Learning to live together (mengenal diri sendiri, mengenal diri orang lain, menemukan tujuan bersama, bekerjasama dengan orang lain)
- d. Learning to be (memecahkan masalah sendiri, mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab, belajar untuk disiplin)
- e. Learning society (mengembangkan diri secara utuh, terus menerus)
- f. Learning organization (belajar memimpin, belajar berorganisasi, belajar mengajarkan kepada orang lain)

Paradigma baru yang dikembangkan bukan untuk mengubah prinsip-prinsip, tetapi diperlukan untuk lebih mampu merespon tantangan-tantangan baru yang muncul dari situasi baru (Slamet,2001 dalam Sadono, 2008:69). Paradigma baru tersebut mencakup :

- a. Jasa informasi, dimana penyuluhan harus mampu menyiapkan, menyediakan, dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani (produksi, pengolahan, pemasaran, dan sebagainya). Informasi perlu dipersiapkan dan dikemas dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti para petani
- b. Lokalitas, dimana untuk memenuhi prinsip lokalitas ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan lembaga sejenisnya

harus difungsi-aktifkan bahkan diperluas penyebarannya sampai ke daerah tingkat II dalam bentuk stasiun-stasiun percobaan dan penelitian. Penelitian yang dilakukan harus bertujuan memecahkan masalah atau kebutuhan petani setempat.

- c. Berorientasi agribisnis, dimana prinsip-prinsip dan teknologi yang berkaitan dengan agribisnis harus lebih banyak dikembangkan dan dipelajari oleh para penyuluh. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga yang menangani pengolahan dan produk-produk olahan itu sangat diperlukan oleh lembaga penyuluhan pertanian,
- d. Pendekatan kelompok, dimana para penyuluh perlu dipersiapkan dengan baik untuk membina kelompok dan mengembangkan kepemimpinan kelompok agar tumbuh menjadi kelompok tani yang dinamis sehingga mampu melancarkan pembangunan masyarakat desa yang benar-benar berasal dari bawah (bottom up)
- e. Fokus pada kepentingan petani, dimana penyuluh harus lebih mendekati diri pada petani dan mampu mengidentifikasi kepentingan petani dan menuangkan dalam program-program penyuluhan melalui kerjasama dengan petani
- f. Pendekatan humanistik-egaliter, dimana para penyuluh perlu dibekali dengan seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan komunikasi sosial, psikologi sosial, dan stratifikasi sosial
- g. Profesionalisme, yaitu perlunya dilakukan penataan dan peningkatan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang menangani tenaga penyuluh
- h. Akuntabilitas, yaitu perlu diciptakan sistem evaluasi dan akuntabilitas yang dapat dioperasikan secara tepat dan akurat, setiap jenis kegiatan penyuluhan harus jelas dan terukur tujuannya, biaya penyuluhan harus dipertimbangkan dengan hasil dan dampak dari penyuluhan tersebut
- i. Memuaskan petani, dimana pendidikan, pelatihan dan keteladanan yang tepat dapat menghasilkan tenaga-tenaga penyuluh yang mampu menyuluh dengan sepenuh hati

Lebih lanjut dijelaskan mengenai tujuan pemberdayaan petani menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 3 bahwa menjelaskan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik
- b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani
- c. Memberikan kepastian usaha tani

- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usah tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

#### **D. Gabungan Kelompok Tani**

##### **1. Pengertian gabungan kelompok tani**

Pengertian gapoktan menurut Peraturan menteri pertanian nomor 82/permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yaitu gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pengertiann gapoktan yang berbeda dikemukakan oleh syahyuti (2007:22) menyatakan bahwa gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis diatas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

Dari beberapa pengertiann tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gabungan kelompok tani adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang bekerjasama dalam usaha agribinsis dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha tani maupu untuk meningkatkan pendapatan petani lainnya

## 2. Karakteristik Gabungan Kelompok Tani

Karakteristik gabungan kelompok tani menurut peraturan menteri pertanian nomor 82/permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yaitu:

### 1) Ciri gabungan kelompok tani

- a. Adanya pertemuan/ rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b. Disusunnya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan, serta dilakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan secara partisipasi;
- c. Memiliki aturan/ norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
- d. Memiliki pencatatan administrasi dan keuangan yang rapi untuk setiap anggota;
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai sektor hulu sampai sektor hilir;
- f. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi agribisnis
- g. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi bagi usahatani anggota kelompok tani yang bergabung dalam gapoktan;
- h. Adanya jalinan kerjasama melalui kemitraan usaha antara gapoktan dengan pihak lain;
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik yang bersumber dari iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha gapoktan

### 2) Unsur pengikat gabungan kelompok tani

- a. Adanya tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani;
- b. Adanya pengurus gapoktan dan pengelola unit-unit usaha agribisnis/ gapoktan yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk memajukan usaha gapoktan;
- c. Adanya unit usaha jasa/usaha tani yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
- d. Adanya pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan;
- e. Adanya kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir;

- f. Adanya pemanfaatan bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi teknologi, pemasaran dan lain-lain.
- 3) Fungsi gabungan kelompok tani
- a. Unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi: gabungan kelompok tani merupakan tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi (pupuk termasuk pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dll) dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usaha tani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani/sisa hasil usaha;
  - b. Unit usaha tani/ produksi: gabungan kelompok tani dapat menjadi unit yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta stabilitas harga;
  - c. Unit usaha pengolahan: gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas yang mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produksi;
  - d. Unit usaha pemasaran: gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan/ fasilitas pemasaran hasil pertanian anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangan gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi harga komoditas, agar gapoktan tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang baik bagi anggotanya;
  - e. Unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam): gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan permodalan bagi anggota, baik yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam anggota serta sisa hasil usaha, maupun dari perolehan kredit melalui perbankan, mitra usaha, atau bantuan pemerintah dan swasta.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menekankan pada menganalisis dan menggambarkan secara rinci, jelas, dan cermat tentang objek yang diteliti dan kondisinya. Menurut Zuriah (2009:47) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:4) menjelaskan penelitian deskriptif bermaksud membuat tujuan pemeriaan (penyandaran) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dari definisi tersebut peneliti menyajikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis hasil wawancara dengan narasumber pegawai dinas Pertanian Kota Madiun mengenai peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini melakukan penyusunan kata-kata untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran atas hasil yang telah diteliti. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) dalam Herdiansyah (2010:9) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Creswell (1998) dalam Herdiansyah (2010:8) menjelaskan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Dalam penelitian ini penulis menyampaikan data dari kutipan orang lain, wacana, atau teks lainnya. Dengan menggunakan jenis ini penulis bermaksud mendapatkan data dan gambaran yang mendalam tentang peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berkedudukan sebagai batas, yaitu berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersiapkan maupun dalam melakukan pembahasan nantinya. Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari yang diteliti guna mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai masalah yang ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan serta mengacu pada kajian teori, peneliti menganalisis beberapa fokus masalah berdasarkan teori Soleh (2014:86-89). Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peranan pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani meliputi:

a) Pembinaan sumberdaya manusia

Dalam penelitian ini mengkaji tentang pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Madiun untuk Gabungan Kelompok Tani.

b) Pembinaan usaha

Dalam penelitian ini mengkaji tentang pembinaan usaha yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Madiun untuk Gabungan Kelompok Tani.

c) Pembinaan lingkungan

Dalam penelitian ini mengkaji tentang pembinaan lingkungan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Madiun untuk Gabungan Kelompok Tani.

d) Pembinaan kelembagaan

Dalam penelitian ini mengkaji tentang pembinaan kelembagaan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Madiun untuk Gabungan Kelompok Tani.

2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani

a) Faktor internal

b) Faktor eksternal

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokus yang pertama yaitu, peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani studi pada Dinas Pertanian Kota Madiun. Kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian adalah suatu daerah yang memiliki batasan yang jelas dengan tujuan agar tidak menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan wilayah penelitian. Dengan mempertimbangkan hal diatas penentuan lokasi penelitian yaitu Pada Kota Madiun

Situs penelitian adalah letak peneliti mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur” Kota Madiun. Dinas Pertanian Kota Madiun merupakan suatu instansi yang menangani potensi sumberdaya alam khususnya sektor pertanian di Kota Madiun. Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur” Kota Madiun merupakan salah satu dari perkumpulan masyarakat petani yang memiliki fokus dalam bidang pertanian dan mendapatkan dari program pemerintah dalam pemberdayaan yang menarik untuk diteliti.

#### D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data utama yang didapat lokasi penelitian, yang diperoleh peneliti langsung dari sumber penelitian, dalam hal ini data primernya merupakan informan. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto dan statistik. Dalam penelitian ini informan dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, dimana peneliti menganggap informan tersebut memiliki informasi yang diperlukan.

Data dapat diperoleh langsung dari informan sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Informan tersebut ditentukan dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu dan pra riset, hal ini dilakukan untuk lebih mengenal lokasi dan situs yang akan diteliti sehingga memudahkan kegiatan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini :

- a. Bapak AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- b. Ibu RN selaku Tim Penyuluh Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur”

- c. Bapak SP selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur”
  - d. Bapak MD selaku Masyarakat Petani gabungan kelompok tani “Tani Makmur”
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya data tersebut dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah berupa literatur, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip Dinas Pertanian Kota Madiun.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dimaksud dalam hal ini adalah cara dalam pemecahan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tanya jawab langsung kepada narasumber untuk memperjelas data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara ini, peneliti bertanya jawab langsung pada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, tim penyuluh Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur”, Ketua Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur”, Masyarakat Petani gabungan kelompok tani “Tani Makmur”.

Frekuensi wawancara dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan durasi wawancara minimal 1 jam. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan data penulis dan menyesuaikan dengan kondisi di

lapangan. Alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan wawancara yaitu kamera, alat perekam, *handphone*, dan buku untuk menulis catatan lapangan yang berisi tentang pokok-pokok informasi dari hasil wawancara dan pengamatan, hal ini digunakan untuk mencatat data-data penting.

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiono (2014:233) membagi wawancara menjadi beberapa macam, yaitu:

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

b) Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c) Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara ini bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis semiterstruktur dengan menggunakan *interview guide* sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun dan menyiapkan pertanyaan yang jawabannya bersifat bebas dijawab oleh informan. Sehingga peneliti harus menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara. Pedoman wawancara diharapkan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Observasi (pengamatan)

Cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Observasi tersebut akan ditujukan pada keadaan di lapangan, terutama:

- a. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani
- b. Pegawai pada Dinas Pertanian Kota Madiun
- c. Masyarakat petani pada Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur”

Frekuensi observasi dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan durasi wawancara minimal 1 jam. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan data penulis dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan wawancara yaitu kamera, alat perekam, *handphone*, dan buku untuk menulis catatan lapangan yang berisi tentang pokok-pokok informasi dari hasil wawancara dan pengamatan, hal ini digunakan untuk mencatat data-data penting.

Sanafah, Faisal yang dikutip oleh Sugiono (2014:226) mengklasifikasikan observasi menjadi 3 macam sebagai berikut:

a) Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b) Observasi terus terang dan tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau

tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

c) Observasi Tak Terstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam kegiatan observasi, yaitu menggunakan jenis observasi terstruktur. Karena peneliti menyatakan secara terstruktur bahwa sedang melakukan penelitian di lokasi tersebut. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk menunjang data yang didapat dari teknik wawancara dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen yang dipelajari dan diamati serta dicatat berdasarkan masalah yang diteliti. Dokumen atau berkas yang terdapat dalam penelitian ini adalah

- a. Data-data tentang program dan kegiatan Gabungan Kelompok Tani di Kota Madiun
- b. Dokumen-dokumen lain yang mendukung

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa:

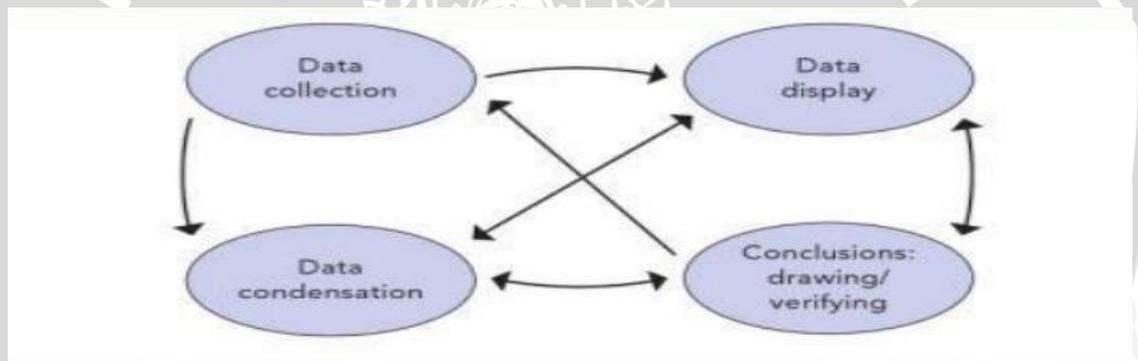
1. Peneliti sendiri, peneliti sebagai instrumen kunci dan paling penting dalam penelitian kualitatif. Karena peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dan yang terakhir membuat kesimpulan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), digunakan sebagai panduan ketika melakukan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.
3. Instrumen penelitian lainnya yaitu buku catatan, alat tulis, kamera, laptop, dan lain-lain yang berisi tentang pokok-pokok informasi dari hasil wawancara dan pengamatan, hal ini digunakan untuk mencatat data-data penting.

## G. Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang harus dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data. Analisis data menurut Sugiono (2013:244) adalah proses mencari dan menyusun secara simetis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ini berkaitan dengan pemahaman peneliti pada informasi yang telah diperoleh kemudian dipilih mana yang penting dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang apa yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya diajukan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Adapun model interaktif adalah sebagai berikut:

**Gambar 1: Componen Of Data Analysis (Interactive Model)**



*Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)*

Komponen dalam analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Penulis melakukan pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Pengumpulan data dilakukan pada Dinas Pertanian Kota Madiun dan Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur”.

## 2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data yang dilakukan oleh peneliti berupa memilih, menyederhanakan, dan mentransformasi hasil wawancara yang didapat dari informan sehingga menjadi rangkuman-rangkuman, tabel, serta gambar melalui matrik.

## 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah terkumpul dan tersusun dalam sebuah tulisan yang nantinya untuk diambil kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan melihat data yang disajikan maka akan membantu peneliti untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Entah melalui analisis lebih lanjut atau mengambil tindakan yang lain berdasarkan pemahaman penulis. Dalam hal ini peneliti juga melakukan pengelompokan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok dimana masing-masing kategori menunjukkan tipologi yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tahap ini penyajian data secara sistematis akan lebih mudah dipahami.

## 4. *Conclusion: Drawing/Verifying* (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi)

Data yang telah terkumpul selanjutnya penuli melakukan penarikan kesimpulan



Madiun – Solo – Jakarta, Surabaya – Madiun – Solo – Bandung. Kota Madiun juga merupakan kota transit yang cukup strategis karena menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111°BT-112°BT dan 7°LS-8°LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Madiun di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan. Tinggi daratan Kota Madiun terletak pada 63 meter hingga 67 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan rata-rata 0% - 2% atau dapat dikatakan relatif datar. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan.

#### **b. Demografis**

Sebagai daerah tropis, Kota Madiun memiliki iklim yang sama dengan seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu musim kemarau sekitar bulan Mei hingga Oktober, dan mengalami musim penghujan antara bulan November hingga April. Suhu udara Kota Madiun berkisar antara 20°C – 35°C dengan kelembaban nisbi udara berkisar 78%. Curah hujan di Wilayah Kota Madiun memiliki lama hari hujan rata-rata tahunan sekitar 100 hari dan besarnya curah

hujan 2.000 mm/tahun, berdasarkan pemantauan dari 4 stasiun pengamat hujan yaitu di Pabrik Gula Rejo Agung, Kantor Madiun, Klegen, dan Pabrik Gula Kanigoro.

Kota Madiun berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo, dan dilintasi oleh Sungai Madiun sebagai sungai utama dengan anak sungai yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Sumber air Kota Madiun berasal dari sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter, sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter.

### **c. Pembangian Administratif Kota Madiun**

Luas wilayah administratif Kota Madiun sebesar 33,23 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km<sup>2</sup>.

### **d. Visi dan Misi Kota Madiun**

#### **1. Visi Kota Madiun**

“Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera”

#### **2. Misi Kota Madiun**

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat,
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik,
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## 2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Madiun

### a. Gambaran Dinas Pertanian Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Dinas Pertanian Kota Madiun mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun Kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
4. Pembinaan UPTD; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**b. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kota Madiun****Visi:**

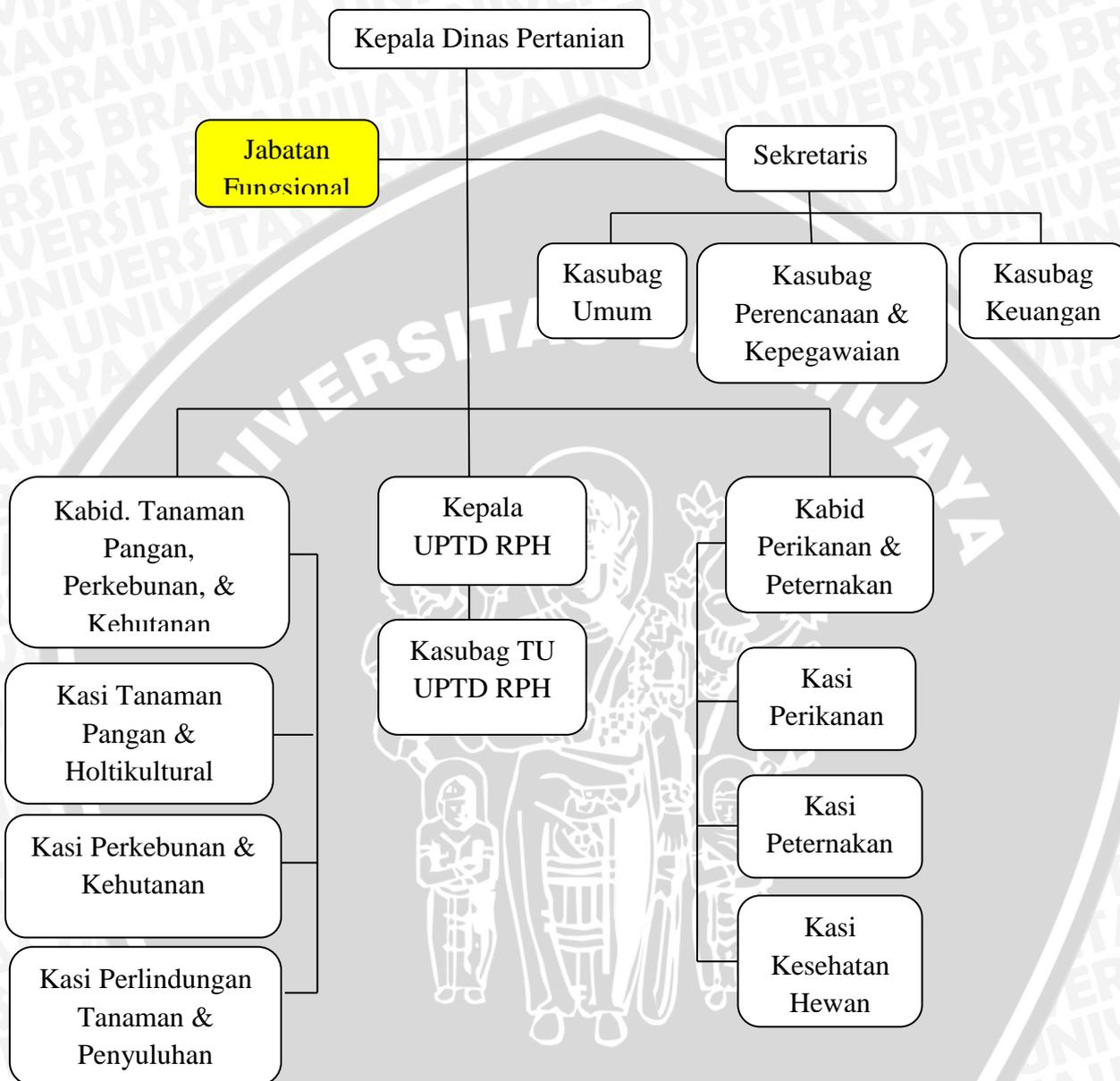
“Terwujudnya budidaya pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian.”

**Misi :**

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan kestabilan produktivitas pangan daerah dan pelayanan masyarakat.”



**c. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Madiun**



**Gambar 3: Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Madiun**

*Sumber: Dinas Pertanian Kota Madiun 2016*

**d. Tata kerja Dinas Pertanian Kota Madiun**

a) Kepala Dinas Pertanian Kota Madiun Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan

b) Sekretariat

c) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

1. Subbag Umum
2. Subbag Perencanaan dan Kepegawaian
3. Subbag Keuangan

Tugas dari Sekretariat adalah melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pertanian meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

d) Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Membawahi seksi sebagai berikut :

1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Seksi Perkebunan dan Kehutanan
3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan

Tugas dari Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan

e) Bidang Peternakan dan Perikanan Membawahi Seksi sebagai berikut :

1. Peternakan,
2. Perikanan,
3. Kesehatan Hewan

Tugas dari Bidang Peternakan dan Perikanan adalah melaksanakan bimbingan usaha peternakan dan perikanan.

f) UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas melakukan urusan di bidang pengembangan dan peningkatan pelayanan RPH, pemeriksaan ternak sebelum dipotong, pembinaan dan pengawasan terhadap mutu daging serta pemungutan retribusi pemotongan hewan.

**e. Kepegawaian Dinas Pertanian Madiun**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Madiun adalah sebagai berikut

**Tabel 3 : Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian Dinas Pertanian**

Berdasarkan Kelamin		Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Gol. Ruang		Berdasarkan Jabatan Struktural		Tenaga Kontrak	
Laki-laki	27 orang	SD	1 orang	I	0 orang	Es.IV/b	1 orang	Pemkot	5 orang
Perempuan	22 orang	SMP	0 orang	II	8 orang	Es.IV/a	10 orang	Pusat	3 orang
		SMA	14 orang	III	30 orang	Es.III/b	2 orang		
		D3	2 orang	IV	6 orang	Es.III/a	1 orang		

	S1 30 orang		Es.III/b 1 orang	
	S2 2 orang			
Jumlah	49 orang	Jumlah 49 orang	Jumlah 44 orang	Jumlah 15 orang
				Jumlah 8 orang

Sumber: Dinas Pertanian, 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui mayoritas SDM di Dinas Pertanian adalah lulusan Sarjana (S1) dan yang berada pada golongan III. Secara kuantitas SDM di Dinas Pertanian relatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tupoksi yang melekat di Dinas Pertanian Kota Madiun.

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani

#### a) Pembinaan sumberdaya manusia

Bina manusia merupakan upaya pertama dan paling utama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Madiun terhadap Gabungan Kelompok Tani sudah menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... yaa kita perlu kita ketahui mbak bahwa keberhasilan program pembangunan pertanian perlu didukung dengan SDM yang berkualitas. Kita telah melakukan penyuluhan pertanian, dengan pendekatan poktan beserta keluarganya dan gapoktan agar mampu mengelola usahataniya secara profesional dan berwawasan agribisnis. Pembinaan dilakukan melalui pendekatan kelompok

bertujuan agar gapoktan mampu melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi mbak. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis yang selanjutnya dapat menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri mbak..”  
(wawancara pada 23 juni 2016 di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan AH, dijelaskan bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani telah memberikan pengaruh yang baik. Dengan adanya penyuluhan dan pelatihan menjadikan petani memiliki pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan usaha taninya yang nantinya dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“... yaa mbak, kita telah melakukan penyuluhan kepada gapoktan dan poktan. Salah satu sistem penyuluhan yang dapat dikatakan efektif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani adalah dilakukannya melalui pendekatan latihan dan kunjungan (LAKU). Latihan adalah kursus yang diperuntukan bagi petani yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menerapkan teknologi, sedangkan kunjungan yaitu pembinaan yang dilakukan oleh para penyuluh kepada petani baik kerumah atau lahan usahatannya dengan suatu tujuan tertentu dengan teratur dan berkesinambungan demi mendorong pencapaian sasaran peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.”  
(wawancara pada 27 juni 2016, di Dinas Peranian Kota Madiun)



**Gambar 4: Penyuluhan Dan Pelatihan Pengelolaan Lahan Sawah**

*Sumber : Dinas Pertanian Kota Madiun .*

Berdasarkan pernyataan RN, dijelaskan bahwa dinas pertanian telah memberikan pemberdayaan kepada gapoktan yaitu penyuluhan melalui pendekatan latihan dan kunjungan. Dengan adanya latihan dan kunjungan SDM pada Gapoktan dapat lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan menjadikan petani yang kuat dan mandiri. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan SP Ketua Gapoktan Tani Makmur

“... dinas pertanian itu sudah memberikan penyuluhan, pelatihan dan kunjungan mbak. Tim penyuluh juga biasanya berkunjung ke gapoktan kita mbak , untuk memberikan pelatihan, informasi, dsb mbak. Pelatihan yang diberikan dinas pertanian itu seperti pelatihan pengendalian hama dan penyakit. Selain itu juga diajarkan cara budidaya tanaman yang baik yaitu dengan penggunaan pupuk berimbang dan tidak berlebih-lebihan dalam

penggunaan pupuknya mbak. Kita juga pernah study banding ke gapoktan maju jogjakarta mbak”  
wawancara pada 4 Juli 2016, di lahan Sawah Bapak Suprpto)

Berdasarkan pernyataan SP, dijelaskan bahwa dinas pertanian telah memberikan pemberdayaan kepada gapoktan yaitu penyuluhan melalui pendektan latihan dan kunjungan. Pelatihan yang diberikan dinas pertanian itu seperti pelatihan pengendalian hama dan penyakit. Selain itu juga diajarkan cara budidaya tanaman yang baik yaitu dengan penggunaan pupuk berimbang dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan pupuknya

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani telah memberikan pengaruh yang baik. Dinas Pertanian Kota Madiun melakukan pemberdayaan Gapoktan dalam kegiatan pembinaan sumberdaya manusia yaitu dengan penyuluhan, pelatihan dan kunjungan. Di harapkan dengan adanya penyuluhan, pelatihan dan kunjungan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan usaha taninya dan dapat menjadi petani yang kuat dan mandiri.

#### **b) Pembinaan Usaha**

Bina usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Bina usaha dalam pemberdayaan dapat memberikan manfaat bagi gapoktan maupun poktan dalam mengembangkan usaha taninya. Hal ini seperti yang dijelaskan

oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... begini mbak, usaha pada Gapoktan di Kota Madiun lebih ditekankan pada pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembang Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM PUAP) yang sudah diperoleh dari Kementerian Pertanian RI sebesar 100 juta rupiah. Seperti Gapoktan Tani makmur yang mendapatkan dana BLM PUAP pada tahun 2012, dana tersebut nantinya dapat digunakan sebagai modal kegiatan usaha tani seperti pembelian pupuk dan pestisida, pembelian benih unggul, dll. Nantinya juga akan ada pendidikan dan peatihan administrasi Gapoktan penerima dana BLM PUAP, selain itu juga akan dilakukan pendampingan bulanan pada Gapoktan penerima dana BLM PUAP oleh penyuluh mbak” (wawancara pada 23 juni 2016 di Dinas Pertanian Kota Madiun)



**Gambar 5: Pelatihan Gapoktan Penerima Pengembang Usaha Agribisnis Pedesaan 2015**

*Sumber: Dinas pertanian Kota Madiun*

Tabel 4 : Rekap Penerima Dana Pengembang Usaha Agribisnis Pedesaan

NO	KECAMATAN	GAPOKTAN/POKTAN	PUAP / Non PUAP (x juta)
<b>A</b>	<b>KARTOHARJO</b>		
1	Rejomulyo	Gap. TANI MULYO KT. Tani Mulyo I KT. Tani Mulyo II KT. Tani Mulyo III KT. Tani Mulyo IV	Non PUAP
2	Pilangbango	Gap. TANI MAKMUR KT. Tani Makmur I KT. Tani Makmur II	Non PUAP
3	Kanigoro	Gap. KANIGORO MAKMUR KT. Lestari KT. Selo KT. Mbulu	PUAP 2012 Rp. 100,-
4	Tawangrejo	Gap. NGUDI BOGO KT. Mardi Boga I KT. Mardi Boga II KT. Ngudi Tani KT. Boga Rahayu KT. Wono Mulyo	PUAP 2013 Rp. 100,-
5	Kelun	Gap. RUKUN MAKMUR KT. Tani Makmur KT. Gawe Makmur	PUAP 2013 Rp. 100,-
6	Sukosari, Klegen, Oro Oro Ombo	Gap. PETANI MANDIRI KT. Sido Luhur KT. Karya Mulya KT. Tani Maju	Non PUAP
<b>B</b>	<b>MANGUHARJO</b>		
1	Manguharjo	Gap. TANI MAKMUR KT. Tani Makmur I KT. Tani Makmur II	PUAP 2012 Rp.

		KT. Tani Mulyo	100,-
2	Winongo	Gap. TANI DADI KT. Tani Dadi I KT. Tani Dadi II	PUAP 2013 Rp. 100,-
3	Ngegong	Gap. KARYA MUKTI KT. Karya Mukti I KT. Karya Mukti II KT. Karya Tani	PUAP 2013 Rp. 100,-
4	Patihan & Sogaten	Gap. GATI MULYO KT. Ngudi Bogo KT. Rukun Santoso	Non PUAP
5	Namb. Lor & Kidul	Gap. REJEKI SUBUR KT. Subur KT. Sri Rejeki	Non PUAP
<b>C</b>	<b>KARTOHARJO</b>		
1	Manisrejo & Banjarejo	Gap. REJO MAKMUR KT. Sri Rejeki KT. Wargo Makmur	Non PUAP
2	Mojorejo & Pandean	Gap. KARYA MAKMUR KT. Rukun Makmur KT. Karya Mukti	Non PUAP
3	Josenan & Demangan	Gap. BUDI AGUNG KT. Setya Budi KT. Tani Agung	Non PUAP
4	Kejuron	Gap. SRI MULYO KT. Tani Makmur KT. Tani Mulyo	Non PUAP

Sumber : Dinas Pertanian

Berdasarkan pernyataan AH, dijelaskan bahwa peran Dinas Pertanian dalam pembinaan usaha pada gapoktan lebih diarahkan pada pengelolaan dana BLM PUAP. Dana tersebut

nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan Gapoktan dalam usaha tani seperti untuk pembelian pupuk. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan SP Ketua Gapoktan Tani Makmur

“... yaaa mbak kita mendapatkan batuan dana BLM PUAP pada tahun 2012. Dinas Pertanian itu sangat berperan aktif mbak dalam pembinaan usaha. Pembinaan usaha yang dilakukan dinas pertanian itu lebih diarahkan dengan adanya bantuan dana PUAP yang kemudian oleh gapoktan disimpan pinjamkan kepada petani (anggota) mbak. Sehingga uang yang ada dari dana PUAP tadi dapat bergulir dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, kebutuhan organisasi serta dapat digunakan untuk pembelian pupuk, obat dan benih mbak.” (wawancara pada 4 Juli 2016, di lahan Sawah Bapak Suprpto)

Berdasarkan pernyataan SP, dijelaskan bahwa Dinas Petanian sangat berperan aktif dalam pembinaan usaha pada gapoktan. Peran Dinas Pertanian tersebut lebih menekankan pada pengelolaan dana BLM PUAP. Dana BLM PUAP meberikan angin segar bagi gapoktan karena dengan adanya bantuan tersebut gapoktan lebih diringankan dalam pembiayaan kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha taninya. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan MD salah satu anggota Gapoktan Tani Makmur

“... yaa mbak, banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pemberdayaan kepada gapoktan mbak, apalagi dengan adanya bantuan berupa dana PUAP 100 juta. Kita mendapatkan dana tersebut pada tahun 2012. Kita sangat di permudah dalam pembiayaan kegiatan gapotan dengan adana bantuan PUAP tesebut. Selain itu dengan organisasi yang hidup dan berkembang seperti ini, akses ke sarana produksi yang di butuhkan petani menjadi lebih mudah dan tersedia.” (wawancara pada 5 Juli 2016, dirumah bapak muhyidi)

Berdasarkan pernyataan SP, dijelaskan bahwa Dinas Petanian sangat berperan aktif dalam pembinaan usaha pada

gapoktan. peran dinas pertanian kota madiun lebih pada danabantuan PUAP 100 juta. Hal tersebut telah di rasakan oleh Gapoktan tani makmur yang mendapatkan bantuan sebesar 100 Juta pada tahun 2012.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah berperan dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani pada hal pembinaan usaha yang lebih diarahkan untuk pengelolaan dana BLM PUAP. Dana BLM PUAP itu di peroleh dari Kementrian Pertanian RI sebesar 100juta. Seperti Gapoktan Tani makmur yang mendapatkan dana BLM PUAP pada tahun 2012. Dana tesebut yang kemudian oleh gapoktan penerima BLM PUAP disimpan pinjamkan kepada petani (anggota). Selain itu dana tersebut juga digunakan oleh gapoktan untuk membiayai kegiatan oerorganisasi, pembelian pupuk, obat dan benih untuk meningkatkan hasil produksi usaha taninya.

### c) **Pembinaan Lingkungan**

Bina lingkungan merupakan upaya penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dinas pertanian Kota Madiun sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah, mempunyai peran dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam hal pembinaan lingkungan. Hal ini di karenakan sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan masalah lingkungan di pandang sangat penting dalam proses

pembangunan. Diharapkan dengan adanya bina lingkungan ini, kelestarian lingkungan alam dapat terjaga. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“... Iya mbak, kegiatan budidaya pertanian tidak hanya berorientasi pada keuntungan petani semata, akan tetapi juga perlu pembelajaran dan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Karena rantai makanan di lingkungan sawah apabila rusak dapat berakibat buruk pula pada hasil pertanian. Oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan sebagaimana prinsip pengelolaan hama terpadu (PHT) dimana hama penyakit memiliki musuh alami yang ada di alam berupa predator dan parasitoid sebagai agen hayati keseimbangan alam. Kondisi lahan sawah yang sudah semakin kritis pun menjadi perhatian dari dinas pertanian kota madiun karena semakin lama tanah sawah yang digunakan apabila terus-menerus menggunakan pupuk kimia akan semakin kurus (lembek) dan mengakibatkan penurunan hasil panen, oleh sebab itu petani diberikan kesadaran akan pentingnya penggunaan pupuk organik guna memperbaiki struktur dan tekstur tanah agar kesuburan tanah meningkat. Selain itu petani juga diikutsertakan dalam kegiatan penanaman pohon baik berupa tanaman buah-buahan maupun tanaman peneduh dan penyerap polusi.” (wawancara pada 27 Juni 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan RN, dijelaskan bahwa Dinas Pertanian sangat berperan aktif dalam pembinaan lingkungan pada gapoktan. Peran Dinas Pertanian tersebut terlihat dengan adanya penyuluhan dan kesadaran kepada petani agar tidak terus menerus menggunakan pupuk kimiawi karena akan merusak tekstur tanah yang nantinya dapat berakibat pada penurunan hasil panen. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan MD salah satu anggota Gapoktan Tani Makmur

“.. tentu mbak, Dinas pertanian memberikan penyuluhan tentang kelestarian lingkungan yaitu dengan program pengelolaan hama terpadu (PHT). Dinas Pertanian juga meyarankan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia karena dapat merusak tanah dan lebih menekankan atau menganjurkan menggunakan pupuk organik pupuk kompos, selain itu juga mengajurkan penggunaan pestisida yang tepat seperti tepat sasaran dan tepat dosis. Juga adanya pelatihan pembuatan pupuk organik mbak, melarang pembakaran jeram, jangan sampai menggunakan obat-obatan kimia yang dosisnya terlalu berlebihan; selain itu juga dengan menanam banyak pohon dan memanfaatkan limbah produksi pertanian.”(wawancara pada 5 Juli 2016, dirumah bapak muhyidi)

Berdasarkan pernyataan MD, dijelaskan bahwa Peranan dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam hal pembinaan lingkungan yaitu dengan adanya penyuluhan untuk tidak menggunakan obat-obtaian kimiawi secara berlebihan. Terlihat Dinas Pertanian sangat berperan aktif dalam pembinaan lingkungan. Diharapkan dengan adanya pembinaan lingkungan tersebut kelestarian lahan sawah dapat terjaga. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“.. yaa mbak, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan budidaya padi tentunya tidak terlepas dari penggunaan pestisida kimiawi, oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan tentang penggunaan pestisida kimiawi. Dalam 4 (empat) tahu terakhir, tidak ditemukan adanya kasus keracunan pesrtisida di masyarakat (petani), hal ini tidak lepas dari seringnya penyuluhan kepada petani maupun gapoktan tentang tata laksana aplikasi pestisida yang aman dan tepat sasaran. Selain itu, disaat petani melaporkan adanya serangan hama penyakit dilahan petugas pengamat hama penyakit selalu memberikan arahan dan petunjuk jenis pestisida apa yang sesuai dan teknik aplikasi yang tepat, sehingga petani saat mengaplikasikan pestisida di lahannya selalu berpedoman pada apa yang telah disarankan oleh petugas pengamat hama

penyakit tanaman (PHPT). Termasuk pula pasca aplikasi, diarahkan untuk mengumpulkan sisa dari pestisida dan ditutup secara sempurna, jauh dari jangkauan anak-anak, tidak membuang bungkus/ botol bekas pestisida disembarang tempat, dan segera membasuh seluruh tubuh dengan air bersih agar pestisida yang menempel pada pakian maupun tubuh dapat larut bersama air. Dan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia, secara rutin dalam kegiatan tahunan dinas pertanian mengadakan kegiatan sosialisasi dan praktek pembuatan pupuk organik ditingkat poktan dan gapoktan.” (wawancara pada 23 Juni 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan AH, dijelaskan bahwa Peranan dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam hal pembinaan lingkungan yaitu dengan adanya penyuluhan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia, secara rutin dalam kegiatan tahunan dinas pertanian mengadakan kegiatan sosialisasi dan praktek pembuatan pupuk organik ditingkat poktan dan gapoktan.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah berperan aktif dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani pada hal pembinaan lingkungan. Hal tersebut terlihat dengan adanya pendampingan tentang penggunaan pestisida kimiawi. Memberikan panduan dan arahan tata laksana penggunaan pestisida di lahan dengan mengacu pada prinsip 6 tepat yaitu tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara dan tepat harga. Karena jika terus-menerus menggunakan bahan kimiawi akan merusak tekstur tanah atau kesuburan tanah yang nantinya dapat berakibat pada penurunan

hasil panen. Selain itu petani juga diberikan pelatihan pembuatan pupuk organik berbahan jerami padi. Serta himbauan untuk tidak membakar jerami sisa panen agar tidak terjadi polusi udara.

#### **d) Pembinaan Kelembagaan**

Bina lembaga merupakan salah satu upaya penting dalam pemberdayaan. Bina kelembagaan dapat meningkatkan dan mengembangkan gabungan kelompok tani menjadi kelembagaan petani agar kuat dan mandiri. Terdapat prinsip kelembagaan yaitu adanya sekelompok orang yang dapat diidentifikasi secara jelas, adanya tujuan yang dicapai dan adanya aturan yang ditaati. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... begini mbak, dinas pertanian memiliki peran mendorong petani untuk meningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya dan mendorong poktan dan gapoktan untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani. Pendirian gapoktan di kota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan, yaitu 6 gapoktan di kecamatan kartoharjo, 5 gapoktan di kecamatan manguharjo dan 4 gapoktan di kecamatan taman. Pada masa awal pendirian, pemberdayaan gapoktan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin di kecamatan maupun ditingkat kota. Tahun 2015 beberapa gapoktan juga menerima bantuan berupa alat mesin tanam dan mesin panen. Dan pada awal tahun 2016, poktan dan gapoktan yang ada di kota madiun diarahkan untuk mengurus status Badan Hukum Indonesia ke kementerian hukum dan HAM RI melalui notaris yang ada di kota madiun. Gapoktan Tani makmur merupakan salah satu Gapoktan yang telah berbadan hukum dengan No. AHU 0026641.AH.01.07.TAHUN 2016 yang ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2016, hal ini dilakukan agar

kedepannya organisasi yang telah berbadan hukum dapat lebih mudah dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah, legal dalam bekerja dan kuat dalam menyongsong perdagangan bebas ASEAN maupun dunia.” (wawancara pada 23 Juni 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)



**Gambar 6: Bantuan Alsintan Gapoktan Tani Makmur**

*Sumber : Dinas Pertanian*

Berdasarkan pernyataan AH, dijelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dinas pertanian dalam hal pembinaan kelembagaan yaitu mengarahkan poktan dan gapoktan untuk mengurus status Badan Hukum Indonesia ke kementerian hukum dan HAM RI melalui notaris yang ada di kota madiun. Gapoktan tani makmur merupakan salah satu gapoktan yang telah berbadan hukum dengan No. AHU 0026641.AH.01.07.TAHUN 2016 yang ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2016.

- a. Adanya sekelompok orang yang diidentifikasi

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... begini mbak, dinas pertanian memiliki peran mendorong petani untuk meningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya dan mendorong poktan dan gapoktan untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani. Pendirian gapoktan di kota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan, yaitu 6 gapoktan di kecamatan kartoharjo, 5 gapoktan di kecamatan manguharjo dan 4 gapoktan di kecamatan taman. Salah satunya dengan berdirinya gapoktan tani makmur mbak. Pada masa awal pendirian, pemberdayaan gapoktan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin di kecamatan maupun ditingkat kota (wawancara pada 23 Juni 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan AH, dijelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dinas pertanian dalam hal pembinaan kelembagaan yaitu dengan . Pendirian gapoktan di kota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan. Pada masa awal pendirian, pemberdayaan gapoktan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin di kecamatan maupun ditingkat kota

Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan SP Ketua Gapoktan Tani Makmur

“ kalo dengan terbentuknya gapoktan dari awal tahun 2011an dan adanya pemberdayaan pada gapoktan itu menjadikan petani lebih berfikir terbuka mbak, karena gapoktan dijadikan

sebagai sarana petani untuk berdiskusi mbak.” (wawancara pada 4 Juli 2016, di lahan sawah bapak suprapto)

Berdasarkan pernyataan SP, dijelaskan bahwa dengan terbentuknya gapoktan petani lebih mudah untuk berdiskusi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“ pembentukan gapoktan tani makmur di mulai dari tahun 2011an dan berdiri sampai sekarang 2016 mbak. Pembentukan gapoktan ini dimaksudkan agar memudahkan petani dalam berdiskusi masalah pertanian, selain itu juga mempermudah kita mbak untuk menyampaikan informasi, teknologi, dan pengetahuan kepada petani mbak. Meskipun anggotanya banyak yang sudah uzur/ tua mbak” (wawancara pada 27 Juni 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah berperan aktif dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani pada hal pembinaan kelembagaan. Hal tersebut terlihat dengan dengan pendirian gapoktan di kota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan, yaitu 6 gapoktan di kecamatan kartoharjo, 5 gapoktan di kecamatan manguharjo dan 4 gapoktan di kecamatan taman. Pada awal pendirian, pemberdayaan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin di kecamatan maupun di tingkat kota

Tabel 5: Daftar Gapoktan/ Poktan Kota Madiun 2016

Kec	Gapoktan / Poktan	Ketua & Alamat
KARTOHARJO	<b>Gap. TANI MULYO</b>	Didik Suwandar, Jl. Madya Sari 4 RT 15 RW 5 Rejomulyo
	KT. Tani Mulyo I	Samidi, Jl. Wiyata Sari 37 RT 23 RW 04 Rejomulyo 081 946 044 414
	KT. Tani Mulyo II	Dwijono, 081 233 026 297
	KT. Tani Mulyo III	Paiman S, Jl. Bumi Jaya 25 RT 19 RW 6 Rejomulyo 0351 472 684
	KT. Tani Mulyo IV	Sutarto, Jl. Loka Jaya 37 RT 23 RW 4 Rejomulyo 085 736 638 795
	<b>Gap. TANI MAKMUR</b>	Suhartini, Jl. Pilang Werda RT 16 RW 4 Pilangbango
	KT. Tani Makmur I	Sumarno, Jl. Pilang Werda Rt 17 RW 4 Pilangbango 081 230 948 852
	KT. Tani Makmur II	Wagiyo, Jl. Pilang Kramat RT 2 RW 1 Pilangbango 081 217 237 100
	<b>Gap. KANIGORO MAKMUR</b>	Djarot, Jl. Sri Langka 26A, Kanigoro, Kartoharjo 085 694 288 928
	KT. Lestari	Bandi, Jl. Jati Kampir 15 RT 22 RW 5 Kanigoro 085 708 176 900
	KT. Selo	Samino, Jl. Ki Ageng Selo Ggg. Pingi II RT 40 RW 10 Kanigoro 082 140 901 275
	KT. Mbulu	Suwarno, Sri Wibowo RT 10 Kanigoro 0351 471 844
	<b>Gap. NGUDI BOGO</b>	Slamet Sungkono, Jl. Tawang Bhakti 2 RT 8 RW 1 Tawangrejo

	KT. Mardi Boga I	Moedjito, Jl. Tawang Sakti 39 RT 5 RW 2 Tawangrejo 082 337 237 711
	KT. Mardi Boga II( <b>Margo Rejo, BHI</b> )	Suwadji, Jl. Tawang Baru 11 RT 9 RW 2 Tawangrejo 085 708 244 744
	KT. Ngudi Tani	Hery P.I, Jl. Tawang Sari Gg. II No. 11 RT 18 RW 5 Tawangrejo 085 336 624 111
	KT. Boga Rahayu	Suprihatin, Jl. Tawang Sari RT 013 RW 004 Tawangrejo 085 233 039 839
	KT. Wono Mulyo	Djaman, Jl. Tawang Bhakti RT 21 RW 6 Tawangrejo 085 102 699 291
	<b>Gap. RUKUN MAKMUR</b>	Sugiono, Jl. Sri Wibowo 2A RT 5 RW 2 Kelun 085 649 193 839
	KT. Tani Makmur	Pardo, 085 736 350 050
	KT. Gawe Makmur	Sunarto, Jl. Jenggolo Puro 29 RT 21 RW 5 Kelun 082 139 292 477
	<b>Gap. PETANI MANDIRI</b>	Sutaryo, Jl. Sri Rejeki RT 4 RW 2 Sukosari
	KT. Sido Luhur	Suharto, Jl. Sri Kaloko 4 RT 7 RW 3 Sukosari 082 142 689 883
	KT. Karya Mulya	Chojin, Jl. Wiyata Jaya 10 RT 26 RW 6 Klegen 085 232 926 451
	KT. Tani Maju	Daru T, Jl. Trengguli 24 RT 10 RW 4 Oro Oro Ombo 081 973 292 080
<b>MANGUHARJO</b>	<b>Gap. TANI MAKMUR</b>	Suprpto, Jl. Sido Makmur 14 RT 27 RW 7 Manguharjo 081 335 857 017
	KT. Tani Makmur I	Soekamto, Jl. Gadjah Mada 354-131 RT 10 RW 2 Manguharjo 081 234 034 664

KT. Tani Makmur II	Mahmud S, Jl. Raden Wijaya Gg. I No. 10 RT 22 RW 6 Manguharjo 081 335 056 575
KT. Tani Mulyo	Suprpto, Jl. Sido Makmur 14 RT 27 RW 7 Manguharjo 081 335 857 017
<b>Gap. TANI DADI</b>	Prasojo, -
KT. Tani Dadi I	Muhyidi, Jl. Pajajaran 21 RT 26 RW 8 Winongo 081 332 345 052
KT. Tani Dadi II	Harsono, Jl. Wirobumi 58 Winongo 085 730 841 799
<b>Gap. KARYA MUKTI</b>	B. Wiran, Jl. Apotek Hidup 17 RT 8 RW 3 Ngegong 085 736 328 232
KT. Karya Mukti I	Kusdi, Jl. Bayem 8 RT 13 RW 4 Ngegong 085 745 666 927
KT. Karya Mukti II(Mitra Tani, BHI)	B. Wiran, Jl. Apotek Hidup 17 RT 8 RW 3 Ngegong 085 736 328 232
KT. Karya Tani	Soebarjono, -
<b>Gap. GATI MULYO</b>	Imam Suyono, Jl. Candi Boko Gg. II No. 01 RT 4 RW 2 Patihan 085 655 775 657
KT. Ngudi Bogo	Siswanto, Jl. Candi Sari 1/6A RT 21 RW 2 Patihan 081 342 295 023
KT. Rukun Santoso	Edy P, Jl. Sekartejo RT 4 RW 2 Sogaten 081 235 520 203
<b>Gap. REJEKI SUBUR</b>	Imam Sukadi, Jl. Tirta Raya 5 RT 67 RT 16 Namb. Lor 085 259 500 543
KT. Subur	Imam Sukadi, Jl. Tirta Raya 5 RT 67 RT 16 Namb. Lor 085 259 500 543
KT. Sri Rejeki	Kasiran, Jl. Urip Sumoharjo Ds. Sidodadi VII/I RT 45 RW 15

<b>TAMAN</b>	<b>Gap. REJO MAKMUR</b>	Bibit Sugiran, 081 335 455 300
	KT. Sri Rejeki	Djurianto, Jl. Pagu Indah 35 RT 1 RW 1 Manisrejo 082 257 103 620
	KT. Wargo Makmur	Maolan, Jl. Banjarwaru RT 1 RW 1 Banjarejo 082 257 090 129
	<b>Gap. KARYA MAKMUR</b>	Agus Riyanto, 081 335 046 063
	KT. Rukun Makmur	Sudiono, Jl. Letjen Haryono 87A RT 45 RW 11 Mojorejo 085 234 341 266
	KT. Karya Mukti	Mucharom, Jl. Panorama Raya 46 RT 54 RW 18 Pandean 081 234 095 151
	<b>Gap. BUDI AGUNG</b>	Subandi, Jl. Ardodali 41 RT 18 RW 6 Josenan 082 332 786 992
	KT. Setya Budi	Subandi, Jl. Ardodali 41 RT 18 RW 6 Josenan 082 332 786 992
	KT. Tani Agung	Pawiro Wage, Jl. Alang Alang RT 20 RW 8 Demangan 085 100 050 922
	<b>Gap. SRI MULYO</b>	Darsit, Dk. Koci RT 19 RW 6 Metesih 081 259 054 98
	KT. Tani Makmur	Yani Asmanto, Jl. Sawahan 28 RT 33 RW 6 Manguharjo 085 735 442 389
	KT. Tani Mulyo	Nippon, 081 252 563 681

Sumber : Dinas Pertanian Kota Madiun

b. adanya tujuan yang dicapai

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... pasti ada tujuan dalam awal pembentukan gapoktan maupun poktan di kota madiun. Salah satu tujuan yang ingin di capai dalam pembinaan kelembagaan ini adalah sebagai tempat berkumpulnya petani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. (wawancara pada 6 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan AH, di jelaskan bahwa tujuan dari pembinaan kelembagaan adalah utuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha petani. Hal tesebut di perkuat dengan pernyataan RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“iya mbak, ada tujuan dalam pembentukan dan pemberdayaan gapoktan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kerjasama yang dibangun oleh petani adalah untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisensi usaha. Meningkatkan skala ekonomi dapat diartikan dengan meningkatnya hasil usaha tani padi sawah dikarenakan semakin mudahnya dalam mendapatkan sarana produksi yang telah dimiliki oleh poktan/ gapoktan, sedangkan efisiensi usaha dapat diartikan dengan mudahnya petani dalam mengakses pasar melalui poktan/ gapoktan, karena apabila dilakukan secara mandiri (pribadi petani) lebih sulit untuk menembus pasar. Kemudahan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian (alat mesin pertanian, pembinaan, pembiayaan) juga menjadi lebih mudah karena sudah menjadi aturan pemerintah bahwa segala wujud bantuan sosial maupun hibah diarahkan kepada poktan/ gapoktan, bukan secara individu petani. Penguatan kelembagaan petani oleh dinas pertanian. (wawancara pada 6 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan RN, di jelaskan bahwa tujuan dari pembinaan kelembagaan adalah utuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha petani. Kemudahan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian (alat mesin pertanian,

pembinaan, pembiayaan) juga menjadi lebih mudah karena sudah menjadi aturan pemerintah bahwa segala wujud bantuan sosial maupun hibah diarahkan kepada poktan/ gapoktan, bukan secara individu petani. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan SP, sebagai Ketua Gapoktan Tani Makmur

“ ada tujuan dalam pembentukan dan pemberdayaan gapoktan mbak yaitu meningkatkan ekonomi petani mbak sehingga kesejahteraan meningkat. Gapoktan itu kan organisasi masyarakat mbak, jadi tujuan kita ya bisa mensejahterakan anggota mbak. Dengan di bentuknya gapoktan ini mbak kita juga lebih banyak mendapatkan bantuan dari dinas mbak. ” (wawancara pada 10 Juli 2016, di Lahan Sawah Bapak Suprapt)

Berdasarkan pernyataan SP, di jelaskan bahwa tujuan dalam pembentukan dan pemberdayaan gapoktan yaitu meningkatkan ekonomi petani sehingga kesejahteraan meningkat. Gapoktan Merupakan organisasi masyarakat jadi tujuan adalah mensejahterakan anggota.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari gapoktan adalah sebagai tempat berkumpulnya petani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan tani makmur memiliki tujuan yang sederhana yaitu untuk meningkatkan ekonomi anggotanya dan untuk mensejahterakan anggotanya.

- c. adanya aturan yang ditaati.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“begini mbak, kalo aturan yang ada di gapoktan dinas pertanian menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing gapoktan. jadi kesepakatan bersama antara pengurus dengan anggota gapoktan mbak.” (wawancara pada 6 Juli 2016, di Dinas pertanian)

Berdasarkan pernyataan AH bahwa dinas pertanian menyerahkan sepenuhnya aturan yang mengatur didalam gapoktan. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan SP, sebagai Ketua Gapoktan Tani Makmur

“.. yaa mbak, kalo aturan yang ada di gapoktan di serahkan sepenuhnya kepada pengurus dan anggota gapoktan mbak. Peraturan yang ada di gapoktan tani makmur itu aturan tidak tertulis tetapi disepakati dan dijalankan oleh seluruh anggota gapoktan mbak. Aturan yang ada di gapoktan tani makmur yaitu (1) dalam periode 5 tahun sekali kepengurusan gapoktan berganti (2) adanya pertemuan rutin satu bulan sekali, setiap malam jumat pertama (3) jika menerima bantuan yang berjumlah banyak seperti pupuk dan bibit bantuan tersebut akan dibagikan ke masing-masing ketua poktan yang selanjutnya akan di salurkan ke anggota (4) jika menerima bantuan yang berjumlah sedikit seperti alat mesin pertanian bantuan tersebut akan di serahkan kepada pengurus gapoktan yang selanjutnya dapat dipinjam oleh anggota (5) pengelolaan dana BLM PUAP dari kementerian RI, oleh gapoktan di simpan pinjamkan dengan ketentuan setiap peminjaman 1juta akan berbunga sebesar 1,5% atau 15.000 ribu. Bunga tersebut di potong didepan per empat bulan. Jadi  $15.000 \times 4 \text{ bulan} = 60.000$  per empat bulan. Jadi jika meminjam uang 1juta akan dipotong bunga sebesar 60.000 ribu, hasil dari bunga simpan pinjam tersebut akan menjadi pemasukan bagi gapoktan mbak” (wawancara pada 10 Juli 2016, di Lahan Sawah Bapak Suprapt)

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan MD, salah satu anggota Gapoktan Tani makmur

“... memang benar mbak, aturan yang ada di gapoktan diserahkan sepenuhnya kepada kami oleh dinas. Begini mbak gapoktan itukan organisasi masyarakat jadi masih belum bisa terstruktur secara formal mengingat juga dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di gapoktan tani makmur ini, salah satunya adalah anggotanya yang sudah uzur/ berusia tua dan ketidakmampuan dalam mengoperasikan komputer jadi peraturan yang ada di gapoktan tani makmur itu aturan tidak tertulis tetapi disepakati dan dijalankan oleh seluruh anggota gapoktan mbak. (wawancara pada 5 Juli 2016, di Rumah Bapak muhyidi)

Berdasarkan pernyataan MD, dijelaskan bahwa gapoktan yang ada belum bisa terstruktur secara formal formal mengingat juga dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di gapoktan tani makmur ini, salah satunya adalah anggotanya yang sudah uzur/ berusia tua dan ketidakmampuan dalam mengoperasikan komputer, sehingga aturan yang ada pada gapoktan Tani makmur itu bersifat tidak tertulis tetapi dijalankan dan sepakati bersama.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dinas pertanian menyerahkan penuh peraturan yang ada di gapoktan kepada pengurus dan anggota gapoktan. peraturan yang ada di gapoktan tani makmur itu aturan tidak tertulis tetapi disepakati dan dijalankan oleh seluruh anggota gapoktan.

## **2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani**

Peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun, khususnya Dinas Pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung serta menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan gabungan kelompok tani

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung ialah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun, terutama Dinas Pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani. Faktor pendukung yang akan peneliti bahas adalah faktor pendukung yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Madiun dan gabungan kelompok tani yang bergerak dalam pengembangan pertanian. Hal tersebut juga mendapat dukungan berbagai pihak yang ikut mengembangkan pertanian sehingga usaha petani menjadi berkembang.

#### **1) Adanya Dukungan Yang Kuat Dari Pemerintah**

Dalam upaya pembangunan, kedudukan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Peranan tersebut dapat berbentuk sebagai dukungan dan bantuan kepada masyarakat. Dukungan dan bantuan yang kuat dari pemerintah tentunya juga akan memperkuat daya masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang

diharapkan. Dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu dinas pertanian kota madiun memberikan dukungan dan bantuan secara penuh kepada gabungan kelompok tani agar mampu mengembangkan pertanian dan usaha pertaniannya. Seperti yang di ungkapkan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... Ya mbak, kita dari dinas pertanian terus berusaha untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada poktan dan gapoktan. Misalnya kita beri bantuan dana BLM PUAP 100 juta diharapkan dengan adanya bantuan dana tersebut petani, gapoktan maupun poktan bisa termotivasi dan bisa lebih bersemangat dalam mengembangkan usaha pertaniannya.” (wawancara pada 6 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“... benar mbak, kita dteruss berusaha memberikan dukungan dan bantuan kepada gapoktan. Dukungan yang kita berikan contohnya dengan adanya pendidikan dan pelatihan selain itu juga ada penyuluhan dan pendampingan kepada gapoktan dalam mengembangkan pertaniannya. Bantuan yang kita berikan yaitu contohnya dengan bantuan dana, alat mesin pertanian dan bibit tanaman. Diharapkan dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari berbagai lembaga lain gapoktan mampu termotuvasi dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Sehingga mampu menjadikan gapktan yang mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan pasar.” (wawancara pada 7 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Pemerintah daerah, yaitu dinas pertanian memiliki peranan penting dalam pemberdayaan . Pemerintah daerah sebagai fasilitator yang memiliki fungsi sebagai pemberi motivasi, semangat maupun sebagai mediator tentunya akan memberikan

pengerauh dalam proses pengembangan usaha pertanian bagi gapokta. Dukungan pemerintah daerah, yaitu dinas pertanian dalam pemberdayaankan pastinya akan lebih membrikan dorongan dan semangat kerja bagi gapktan dalam meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan MD salah satu anggota Gapoktan Tani Makmur.

“... benar sekali mbak, kami sebagai petani itu sangat termotivasi dengan dukungan dan bantuan yang diberikan dinas pertanian kepada kami. Kami merasa senang mbak medapatkan bantuan dana, alat mesin pertanian obat-obatan maupun pupuk. Meskipun kalau alat pertanian itu seperti alat mesin tanam dan mesin panen itu dapat digunakannya secara bergantian mbak. Tapi kita tetap merasa terbantu dengan bantuan yang dinas pertanian berikan. Sering diakan penyuluhan dan pelatihan mbak jadi kami mendapatkan penmbahan ilmu dan pengalaman mbak.” (wawancara pada 5 Juli 2016, dirumah bapak muhyidi)

Berdasarkan pernyataan MD, bahwa petani sangat terdukung dengan diberinya bantuan oleh dinas pertanian kota madiun. Selain itu dinas pertanian sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan mbak jadi kami mendapatkan penmbahan ilmu dan pengalaman. Dukungan dan bantuan dari pemerintah mampu memberikan motivasi dan semngat bagi gapoktan untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Dukungan dan bantuan tersebut menjadi faktor pendukung bagi gapoktan dalam meningkatkan kualitasnya dalam bertani. Diharapkan dengan adanya dukungan dari pemerintah mampu menjadikan gapktan yang tangguh, bersemngat kerja dan mandiri dalam mengembangkan pertanian.

## 2) Telah Terbentuknya Poktan Dan Gapoktan Di Kota Madiun

Terbentuknya poktan dan gapoktan merupakan faktor pendukung utama dalam melakukan perberdayaan. Dengan adanya gapoktan koordinasi antara pemerintah dan petani menjadi lebih mudah. Adanya kerja sama dan koordinas antara pemerintah dan gapoktan semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat petani khususnya. Banyak manfaat yang didapat dengan terbentuknya poktan maupun gapoktan seperti bantuan, pengetahuan, dan ketrampilan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“... pendirian gapoktan dikota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan, yaitu 6 gapoktan di kecamatan kartoharjo, 5 gapoktan dikecamatan manguharjo dan 4 gapoktan dikecamatan taman. Pada awal pendirian, pemberdayaan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin dikecamatan maupun di tingkat kota.” (wawancara pada 7 Juli 2016,di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Hal tersebut di perkuat oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... begini mbak, sebagaimana definisi dari gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kerjasama yang dibangun oleh petani adalah untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha. Meningkatkan skala ekonomi dapat diartikan dengan meningkatkan hasil usaha tani padi sawah dikarenakan semakin mudahnya dalam mendapatkan sarana produksi yang telah dimiliki oleh pokta/gapoktan. Sedangkan

efisiensi usaha dapat diartikan dengan mudahnya petani dalam mengakses pasar melalui poktan/gapoktan, karena apabila dilakukan secara mandiri (pribadi petani) lebih sulit untuk menembus pasar. Kemudahan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian (alat mesin pertanian, pembinaan, pembiayaan) juga menjadi lebih mudah karena sudah menjadi aturan pemerintah bahwa segala wujud bantuan sosial maupun hibah diarahkan kepada poktan/ gapoktan, bukan secara individu petani.” (wawancara pada 6 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Terbentuknya poktan dan gapoktan menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan. Keberadaan gapoktan mempermudah akses pemerintah dalam memberikan pelatihan, pendidikan penyuluhan dan ketrampilan bagi petani. Dengan adanya gapoktan koordinasi antara pemerintah dan petani menjadi lebih mudah dan pemerdayaan kepada petani dapat mencapai sebuah tujuan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan SP Ketua Gapoktan Tani Makmur

“... iya mbak, dengan adanya gapoktan menjadikan petani bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan dan informasi dibidang pertanian mbak. Selain itu dengan terbentuknya gapoktan, sekarang kita sudah tidak bingung lagi dalam mencari tukang tanam dan tukang panen karena pada gapoktan diberikan bantuan berupa mesin tanam dan mesin panen.” (wawancara pada 4 Juli 2016, di lahan sawah bapak suprpto)

Berdasarkan pernyataan SP, dijelaskan bahwa dengan adanya gapoktan menjadikan petani bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan dan informasi dibidang pertanian. Selain itu dengan terbentuknya gapoktan petani merasa di mudahkan dalam mencari tukang tanam dan panen.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan terbentuknya poktan maupun gapoktan di kota madiun memberikan angin segar bagi petani. Dengan adanya gaoktan kemudahan akses dalam menerima pengetahuan dan inforamasi pertanian menjadi terbuka dan mudah. Selain itu degan adanya gapoktan menjadikan petani memiliki daya untuk mengembangkan pertaniannya. Diharapkan dengan adanya gapoktan petani dapat meningkatkan kualitas pertaniannya dan menjadikan petani yang mandiri dan kuat dalam bersaing dipasar.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat ialah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap Pemerintah Daerah Madiun khususnya Dinas Pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami Dinas Pertanian adalah

##### **1) Sumber daya petani yang sebagian masih berpendidikan rendah**

Dalam proses pengembangan pertanian, sumberdaya manusia yaitu petani diharapkan mampu mengelola pertanian dengan baik. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan jumlah dan kualitas SDM yang mumpuni, diharapkan mampu menggerakkan kegiatan dengan baik. Namun sayangnya, jumlah SDM petani masih terbilang relatif

kurang. Sehingga ini juga dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan pertanian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... iyaa mbak, salah satu faktor penghambat dalam pembedayaan gapoktan adalah SDM petani yang masih sebagian berpendidikan rendah. Sehingga dalam penyampaian informasi dan pengetahuan untuk petani tidak bisa maksimal. Selama ini kita berusaha untuk memberikan pemahaman tentang informasi secara berkala supaya lebih mudah di terima oleh petani.” (wawancara pada 6 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Hal tersebut di perkuat oleh RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“... memang benar mbak, SDM menjadi salah satu kendala dalam pemberdayaan gapoktan. petani yang sebagian masih berpendidikan rendah selain itu juga usia petani yang sudah uzur atau tua menghambat dalam menerima informasi. Selain itu anak muda di sekitar sini lebih memilih bekerja di pabrik mbak daripada menjadi petani.” (wawancara pada 7 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Berdasarkan pernyataan RN, dijelaskan bahwa, SDM menjadi salah satu kendala dalam pemberdayaan. Mengingat petani yang ada di kota madiun yang sebagian masih berpendidikan rendah. Selain itu anak muda yang ada lebih memilih bekerja di pabrik daripada menjadi petani.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa SDM menjadi faktor penting dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani. SDM menjadi kunci dalam keberhasilan usaha pertanian, namun sayangnya masih ada petani yang bepebdidikan rendah dan berusia

uzur atau tua. Selain itu anak muda lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik ketimbang bertani. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian penuh dari Dinas Pertanian Kota Madiun untuk memberikan motivasi dan semangat.

## 2) Semakin berkurangnya luas lahan sawah

Dalam proses pengembangan pertanian, lahan sawah merupakan faktor penting dalam usaha pertanian. Lahan pertanian dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu dengan semakin berkurangnya luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan pertanian akan berdampak pada kemampuan dalam memproduksi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur

“... iya mbak, memang lahan sawah kota madiun semakin menyempit dikarenakan alih fungsi lahan. Ini juga sebagai faktor yang menghambat dalam pemberdayaan gapoktan mbak. Kita sebagai dinas pertanian tidak bisa melarang petani untuk tidak menjual lahan sawahnya, karena lahan sawah yang dimiliki petani itu bersifat individu atau milik pribadi. Kedepannya kita akan mengusahakan adanya bantuan-bantuan alat pertanian, bibit, dan pupuk sebagai iming-iming agar petani tidak menjual lahan sawahnya dengan mudah.” (wawancara pada 7 Juli 2016, di Dinas Pertanian Kota Madiun)

Hal tersebut diperkuat oleh AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun

“... memang benar mbak, lahan sawah dikota madiun mengalami alih fungsi lahan. Di alih fungsikan ke perumahan dan perkantoran mbak. Namun kita berusaha untuk menekan alih fungsi lahan sawah dengan menjadikan tegalan sebagai lahan sawah mbak.”

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa lahan sawah merupakan faktor penting dalam peberdayaan gapoktan. adanya alih fungsi lahan pertanian juga dapat mengurangi tingkat produksi pertanian pemerintah daerah, yaitu dinas pertanian harus memberikan perhatian lebih kepada petani agar tidak mudah menjual lahan sawahnya.

### **C. Pembahasan dan Analisis Data**

#### **1. Peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani**

##### **a) Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Bina sumberdaya manusia merupakan upaya pertama dan paling utama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program pembangunan pertanian perlu didukung dengan sumberdaya yang berkualitas. Bina sumberdaya manusia ini bertujuan agar petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani mampu melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi.

Berdasarkan hasil dari penelitian Dinas Pertanian telah berperan aktif dalam pemberdayaa, hal ini terlihat dengan adanya penyuluhan dari dinas pertanian yang di berikan kepada gabungan kelompok petani. Salah satu sistem penyuluhan yang dapat dikatakan efektif

dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani adalah dilakukannya melalui pendekatan latihan dan kunjungan (LAKU). Gabungan koelompok tani mendapatkan pelatihan dari dinas pertanian yaitu seperti pelatihan pengendalian hama dan penyakit. Selain itu juga diajarkan cara budidaya tanaman yang baik yaitu dengan penggunaan pupuk berimbang dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan pupuknya.

. Menurut soleh (2014:86-89) ruang lingkup pemberdayaan salah satunya yaitu dengan adanya bina manusia. Dalam bina manusia terdapat kegiatan yang dapat dilakukan seperti pengembangan kapasitas individu, pengembangan entitas/ kelembagaan dan pengembangan kapasitas sitem (jejaring). Hal ini juga tidak lepas dari peranan penting pemerintah sebagai inovator yang dijelaskan menurut Siagian (2001:142-149). Selaku inovator pemerintah harus menjadi sumber hal-hal baru, seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan adanya perbaikan prosedur dan metode kerja.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Soleh maka Peranan pemerintah dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani sudah dilakukan pemerintah kota madiun, yaitu dinas pertanian dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan Gabungan Kelompok Tani yang mendapatkan latihan yaitu kursus yang diperuntukan bagi petani yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam

menerapkan teknologi. Sesuai dengan pendapat dari Siagian bahwa pemerintah harus menjadi sumber hal-hal baru, seperti metode baru dan adanya perbaikan prosedur dan metode kerja. Hal tersebut terlihat dengan pemerintah Kota Madiun, yaitu Dinas Pertanian terus berusaha melakukan kunjungan yaitu pembinaan yang dilakukan oleh para penyuluh kepada petani baik kerumah atau lahan usahatani dengan suatu tujuan tertentu secara teratur dan berkesinambungan demi mendorong pencapaian sasaran peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan petani. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggota gabungan kelompok tani dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis yang selanjutnya dapat menjadi petani yang kuat dan mandiri.

#### **b) Pembinaan Usaha**

Pembinaan usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Pembinaan usaha dalam pemberdayaan dapat memberikan manfaat bagi gapoktan maupun poktan dalam mengembangkan usaha taninya. Terdapat kegiatan pemberdayaan berkaitan dengan bina usaha antara lain : pengembangan dan pengelolaan informasi bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan usaha.

Berdasarkan hasil dari penelitian pemerintah Kota Madiun telah berperan aktif dalam memberikan pembinaan usaha kepada gapoktan. Upaya yang dilakukan pemerintah kota madiun dalam hal

pembinaan usaha yaitu diarahkan pada pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembang Usaha Agribisnis (BLM PUAP) yang diperoleh dari Kementerian Pertanian RI. Dana BLM PUAP memberikan kemudahan bagi gapoktan karena dengan adanya bantuan tersebut gapoktan lebih diringankan dalam pembiayaan kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha taninya. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan oleh gapoktan untuk, pembelian pupuk, obat dan benih untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya.

Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Soleh (2014:86-89) bahwa ruang lingkup dari pemberdayaan adalah adanya bina usaha atau pembinaan usaha. Terdapat kegiatan dalam pemberdayaan yang berkaitan dengan pembinaan usaha yaitu perencanaan investasi dan perencanaan bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan usaha, serta pengembangan dan pengelolaan informasi bisnis. Selain itu pemerintah sebagai fasilitator wajib menyediakan kemudahan bagi masyarakat. Menurut Mardikanto dalam Soleh (2014:181-182) dijelaskan bahwa sebagai fasilitator, pemerintah harus memberikan berbagai bentuk kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat. Tersedianya kemudahan akses dalam menerima bantuan atau permodalan dapat memperlancar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Soleh bahwa Pembinaan usaha gapoktan merupakan salah satu dari ruang lingkup

pemberdayaan maka peranan pemerintah dalam pemberdayaan gapoktan salah satunya di wujudkan dengan pembinaan usaha bagi gapoktan. Hal tersebut terlihat melalui adanya pembinaan pengelolaan dana BLM PUAP. Pembinaan usaha dari dinas pertanian ke pada gapoktan diharapkan mampu memberi kemudahan bagi petani untuk terus mengembangkan pertaniannya. Menurut Pendapat Mardikanto dalam Soleh, pemerintah harus memberikan berbagai bentuk kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat. Hal tersebut terlihat dengan pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan dan mengembangkan pertanian menjadi lebih baik dan berkualitas, yaitu ditunjukkan dengan memberikan kemudahan akses bagi gapoktan untuk menerima dana BLM PUAP. Gabungan Kelompok Tani “Tani Makmur” merupakan salah satu gapoktan yang mendapatkan pembinaan usaha pengelolaan dana BLM PUAP Yang di peroleh pada tahun 2012. Dengan kemudahan dalam menerima bantuan atau permodalan diharapkan tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan dan perbaikan.

### c) **Pembinaan Lingkungan**

Bina lingkungan merupakan upaya penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dinas pertanian Kota Madiun sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah, mempunyai peran dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam hal pembinaan lingkungan.

Berdasarkan hasil dari penelitian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Madiun telah memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Peran Dinas Pertanian tersebut terlihat dengan adanya penyuluhan dan penyadaran kepada petani agar tidak terus menerus menggunakan pupuk kimiawi karena akan merusak tekstur tanah yang nantinya dapat berakibat pada penurunan hasil panen.

Pembinaan lingkungan yang dirasakan gapoktan merupakan salah satu dari ruang lingkup pemberdayaan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Soleh (2014:86-89) bahwa pembinaan lingkungan adalah upaya penting dalam pemberdayaan, hal ini dikarenakan sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan masalah lingkungan dipandang sangat penting dalam proses pembangunan. Selanjutnya menurut Soleh (2014:82) bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah adanya perbaikan lingkungan hidup. Meningkatkan perbaikan lingkungan hidup merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang tidak dikehendaki.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan soleh bahwa pembinaan lingkungan merupakan upaya penting dalam pemberdayaan karena dengan meningkatkan perbaikan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam upaya melakukan pembinaan

lingkungan, langkah yang dilakukan Dinas Pertanian dengan melakukan program pengelolaan hama terpadu (PHT). Dinas Pertanian juga meyarankan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia karena dapat merusak tanah dan lebih menekankan atau menganjurkan menggunakan pupuk organik pupuk kompos, selain itu juga mengajurkan penggunaan pestisida yang tepat seperti tepat sasaran dan tepat dosis.

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan gapoktan berkaitan dengan pembinaan lingkungan diharapkan mampu memberikan pelestarian pada lingkungan alam. Hal tersebut terlihat dengan adanya pendampingan tentang penggunaan pestisida kimiawi. Memberikan panduan dan arahan tata laksana penggunaan pestisida di lahan. Karena jika terus-menerus menggunakan bahan kimiawi akan merusak tekstur tanah atau kesuburan tanah yang nantinya dapat berakibat pada penurunan hasil panen. Selain itu petani juga diberikan pelatihan pembuatan pupuk organik berbahan jerami padi. Serta himbauan untuk tidak membakar jerami sisa panen agar tidak terjadi polusi udara. Dinas Pertanian sangat berperan aktif dalam pembinaan lingkungan. Diarapkan dengan adanya pembinaan lingkungan tersebut kelestarian lahan sawah dapat terjaga.

#### d) Pembinaan Kelembagaan

Pembinaan lembaga merupakan salah satu upaya penting dalam pemberdayaan. Pembinaan kelembagaan dapat meningkatkan dan mengembangkan gabungan kelompok tani menjadi kelembagaan petani agar kuat dan mandiri. Dinas Pertanian memiliki peran mendorong petani untuk meningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya dan mendorong poktan dan gapoktan untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani.

Berdasarkan hasil dari penelitian pemberdayaan yang dilakukan dinas pertanian dalam hal pembinaan kelembagaan yaitu mengarahkan poktan dan gapoktan untuk mengurus status Badan Hukum Indonesia ke kementerian hukum dan HAM RI melalui notaris yang ada di kota madiun. Gapoktan Tani makmur merupakan salah satu Gapoktan yang telah berbadan hukum dengan No. AHU 0026641.AH.01.07.TAHUN 2016 yang ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2016.

Adanya pemberdaayaan yang berkaitan pembinaan kelembagaan memberikan dampak postif bagi gapoktan. Pembinaan kelembagaan merupakan salah satu dari ruang lingkup pemberdayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Soleh (2014: 86-89) bahwa pembinaan kelembagaan merupakan upaya penting dalam

pemberdayaan. Organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan orang-orang (para petani) mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu (perorangan). Terdapat prinsip kelembagaan yaitu adanya sekompok orang, adanya tujuan yang dicapai dan adanya aturan yang ditaati.

#### 1. Adanya Sekelompok Orang Yang Di Identifikasi

Pemberdayaan yang dilakukan dinas pertanian dalam hal pembinaan kelembagaan yaitu dengan pendirian gapoktan dikota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan. Pada masa awal pendirian, pemberdayaan gapoktan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin di kecamatan maupun ditingkat kota. Pembentukan Gapoktan Tani Makmur di mulai dari tahun 2011an dan berdiri sampai sekarang 2016. Pembentukan gapoktan ini dimaksudkan agar memudahkan petani dalam berdiskusi masalah pertanian, selain itu juga mempermudah kita mbak untuk menyampaikan informasi, teknologi, dan pengetahuan kepada petani.

#### 2. Adanya Tujuan Yang Dicapai

Tujuan dalam pembentukan dan pemberdayaan gapoktan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kerjasama yang dibangun oleh petani adalah

untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Meningkatkan skala ekonomi dapat diartikan dengan meningkatnya hasil usaha tani padi sawah dikarenakan semakin mudahnya dalam mendapatkan dalam mendapatkan sarana produksi yang telah dimiliki oleh poktan/ gapoktan, sedangkan efisiensi usaha dapat diartikan dengan mudahnya petani dalam mengakses pasar melalui poktan/ gapoktan, karena apabila dilakukan secara mandiri (pribadi petani) lebih sulit untuk menembus pasar. Kemudahan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian (alat mesin pertanian, pembinaan, pembiayaan) juga menjadi lebih mudah karena sudah menjadi aturan pemerintah bahwa segala wujud bantuan sosial maupun hibah diarahkan kepada poktan/ gapoktan, bukan secara individu petani. Penguatan kelembagaan petani oleh dinas pertanian. maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari gapoktan adalah sebagai tempat berkumpulnya petani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan tani makmur memiliki tujuan yang sederhana yaitu untuk meningkatkan ekonomi anggotanya dan untuk mensejahterakan anggotanya.

### 3. Adanya Aturan Yang Ditaati.

Dinas Pertanian menyerahkan penuh peraturan yang ada di gapoktan kepada pengurus dan anggota gapoktan. Peraturan yang

ada di gapoktan tani makmur itu aturan tidak tertulis tetapi disepakati dan dijalankan oleh seluruh anggota gapoktan. Aturan yang ada di gapoktan tani makmur yaitu (1) dalam periode 5 tahun sekali kepengurusan gapoktan berganti (2) adanya pertemuan rutin satu bulan sekali, setiap malam jumat pertama (3) jika menerima bantuan yang berjumlah banyak seperti pupuk dan bibit bantuan tersebut akan dibagikan ke masing-masing ketua poktan yang selanjutnya akan di salurkan ke anggota (4) jika menerima bantuan yang berjumlah sedikit seperti alat mesin pertanian bantuan tersebut akan di serahkan kepada pengurus gapoktan yang selanjutnya dapat dipinjam oleh anggota (5) pengelolaan dana BLM PUAP dari kementrian RI, oleh gapoktan di simpan pinjamkan dengan ketentuan setiap peminjaman 1juta akan berbunga sebesar 1,5% atau 15.000 ribu. Bunga tersebut di potong didepan per empat bulan. Jadi  $15.000 \times 4 \text{ bulan} = 60.000$  per empat bulan. Jadi jika meminjam uang 1juta akan dipotong bunga sebesar 60.000 ribu, hasil dari bunga simpan pinjam tersebut akan menjadi pemasukan bagi gapoktan.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Soleh, pemerintah Kota Madiun yaitu Dinas Pertanian telah berperan aktif dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani pada hal pembinaan kelembagaan. Hal tersebut terlihat dengan pendirian gapoktan dikota madiun dirintis oleh dinas pertanian kota madiun mulai tahun 2011

dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan, yaitu 6 gapoktan di kecamatan kartoharjo, 5 gapoktan dikecamatan manguharjo dan 4 gapoktan dikecamatan taman. Salah satunya adalah dengan berdirinya gapoktan tani. makmur Pada awal pendirian, pemberdayaan dilakukan dalam wujud penyuluhan dan pertemuan rutin dikecamatan maupun di tingkat kota. Selanjutnya, mulai diarahkan untuk mengurus status Badan Hukum Indonesia agar nantinya legal dalam bekerja, kuat dan mandiri dalam menyongsing perdagangan bebas. Peranan pemerintah dalam pemberdayaan gapoktan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat

Peranan Pemerintah Daerah Kota Madiun khususnya Dinas Pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung serta menjadi penghambat dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani.

## 2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam Pemberdayaan Gabungan kelompok tani

### a. Faktor pendukung

#### 1) Adanya Dukungan Yang Kuat Dari Pemerintah

Dalam upaya pembangunan, kedudukan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Peranan tersebut dapat berbentuk sebagai dukungan dan bantuan kepada masyarakat. Dukungan dan bantuan yang kuat dari pemerintah tentunya juga akan memperkuat daya masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian, pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian Kota Madiun memberikan dukungan dan bantuan secara penuh kepada gabungan kelompok tani agar mampu mengembangkan pertanian dan usaha pertaniannya. Dukungan yang diberikan yaitu berupa pelatihan seperti Pembuatan pupuk kompos, panduan dan tata laksana penggunaan pestisida kimiawai dan bantuan permodalan dana BLM PUP, bantuan alat dan mesin pertanian. Pemerintah daerah, yaitu dinas pertanian memiliki peranan penting dalam pemberdayaan. Pemerintah daerah sebagai fasilitator yang memiliki fungsi sebagai pemberi motivasi, semangat maupun sebagai mediator tentunya akan memberikan pengaruh dalam proses pengembangan usaha pertanian bagi gapoktan.

Dukungan pemerintah daerah, yaitu dinas pertanian dalam pemberdayaannya pastinya akan lebih memberikan dorongan dan semangat kerja bagi gapoktan dalam meningkatkan kualitasnya. Dukungan dari berbagai pihak sebagai fasilitator merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian suatu tujuan. Menurut Soleh (2014:177) dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan tenaga-tenaga fasilitator yang handal, bukan hanya menyangkut persoalan yang bersifat fasilitatif semata, tetapi juga harus mampu memberikan motivasi, advokasi atau pembelaan dan melindungi kepentingan mereka dari kepentingan pihak lain yang dapat merugikan mereka.

Apabila dikaitkan dengan penyataan soleh maka dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas pertanian melalui pemberdayaan, Pemerintah Kota Madiun, yaitu dinas pertanian telah berupaya dengan baik. Sebagai fasilitator pemerintah telah memberikan motivasi, semangat, arahan, serta dukungan bagi gapoktant untuk terus mengembangkan pertanian. Hal tersebut terlihat dengan adanya dukungan yang dilakukan pemerintah dengan adanya bantuan dana (permodalan), bantuan alat mesin pertanian bantuan pupuk, serta bantuan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (gapoktan)

## 2) Telah Terbentuknya Poktan Dan Gapoktan Di Kota Madiun

Berdasarkan hasil dari penelitian Dinas pertanian kota madiun telah berperan aktif dalam pemberdayaan gapoktan, hal ini terlihat dengan terbentuknya poktan dan gapoktan di Kota Madiun. Terbentuknya poktan dan gapoktan merupakan faktor pendukung utama dalam melakukan perberdayaan. Dengan adanya gapoktan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan petani menjadi lebih mudah. Adanya kerja sama dan koordinas antara pemerintah dan gapoktan semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat petani khususnya. Hal ini dirasakan oleh petani yaitu dengan adanya gapoktan akses dalam menerima pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan ketrampilan dari pemerintah menjadi lebih mudah didapatkan.

Pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator memiliki fungsi untuk melakukan kerja sama. Menurut Soleh (2014:180) kerjasama dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan hubungan baik dengan penerima manfaat, tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun non formal. Selanjutnya menurut Syahyuti (2007:22) gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompoktani yang melakukan usaha agribisnis diatas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lain.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Soleh maka Dinas pertanian Kota madiun telah melakukan kerjasama dengan tokoh

masyarakat. Kerjasama yang dibina telah mampu memberikan manfaat bagi petani hal ini terlihat dengan telah terbentuknya gapoktan di Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi. Selanjutnya berdasarkan pendapat Syahyuti bahwa gapoktan merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis. Hal tersebut terlihat dengan pendirian gapoktan di Kota Madiun dirintis oleh Dinas Pertanian Kota Madiun mulai tahun 2011 dan telah berjalan hingga 2016 ini. Terbentuk sebanyak 15 gapoktan yang terbagi di 3 kecamatan, yaitu 6 gapoktan di kecamatan kartoharjo, 5 gapoktan di kecamatan manguharjo dan 4 gapoktan di kecamatan taman, sehingga dengan terbentuk Gapoktan di Kota Madiun memiliki dampak positif khususnya bagi petani. Dengan terbentuknya gapoktan di Kota Madiun, pelayanan kepada petani lebih dipermudah baik untuk bantuan obat, kebutuhan informasi dan teknologi pertanian. Selain itu dengan terbentuknya gapoktan, petani sudah tidak bingung lagi dalam mencari tukang tanam dan tukang panen karena pada gapoktan diberikan bantuan berupa mesin tanam dan mesin panen oleh pemerintah melalui dinas pertanian.

## b. Faktor penghambat

### 1) Sumber daya petani yang sebagian masih berpendidikan rendah

Berdasarkan hasil dari penelitian sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam pemberdayaan. Sumberdaya manusia yang berkompetensi dan berkualitas, diharapkan mampu menggerakkan kegiatan pemberdayaan dengan baik. Namun hal ini tidak terjadi pada Gapoktan Tani Makmur dimana kualitas petani masih relatif rendah. Kualitas tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masih menjadikan banyak petani masih bersifat, individualisme, serta sulit untuk menerima adanya teknologi, informasi, dan pengetahuan baru.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan keberhasilan dalam bidang pertanian. Menurut Harijati (2007) kemampuan pribadi petani adalah segala ciri yang dimiliki seseorang sepanjang hidupnya, meliputi umur, pendidikan formal, pengalaman, kebutuhan, motivasi dan sifat kewirausahaan. Suharman (2005) dalam Harijati, kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Semakin berpengetahuan maka kinerja pertanian akan semakin tinggi. Tingkat Pendidikan yang

tinggi menyebabkan petani semakin mampu menangkap informasi, inovasi, dan teknologi baru.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Harijati bahwa kemampuan pribadi petani merupakan segala ciri yang dimiliki oleh seseorang sepanjang hidup hal tersebut sedikit terlihat pada individu petani di Kota Madiun, petani yang telah berusia uzur atau tua memiliki pengalaman bertani secara nonformal atau secara turun temurun. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pernyataan Suharman dalam Harijati bahwa Semakin berpengetahuan maka kinerja pertanian akan semakin tinggi Namun nampaknya sumber daya manusia yang berkompetensi belum begitu nampak pada petani di Kota Madiun. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penghambat dalam pemberdayaan masyarakat petani. Merubah pola pikir dan perilaku menjadi tanggungan pemerintah agar masyarakat lebih terbuka dan mau menerima informasi, dan teknologi. Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan pada masyarakat akan semakin meningkatkan kualitas produktivitas yang dilakukan masyarakat.

## 2) **Semakin berkurangnya luas lahan sawah**

Pembangunan pertanian di Kota Madiun merupakan bagian dari pembangunan pertanian secara nasional maupun regional serta merupakan bagian pembangunan Kota Madiun dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan. Fungsi utama lahan sawah adalah untuk mendukung pengembangan produksi pangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian areal pertanian Kota Madiun yang semakin menyempit karena terjadinya alih fungsi lahan menjadikan faktor penghambat dalam pemberdayaan Gapoktan, secara logis dengan menyempitnya area lahan karena terjadinya alih fungsi lahan akan berpengaruh pada kemampuan berproduksi. Penyempitan lahan pertanian dikarenakan adanya pembangunan pemukiman, jalan maupun kawasan industri. Dengan adanya alih fungsi lahan juga akan berdampak pada keadaan sosial ekonomi, khususnya masyarakat petani.

Menurut Iqbal dan Sumaryanto (2007), secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan adalah sawah.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Iqbal dan Sumaryanto memang benar bahwa lahan pertanian kota madiunlah yang menjadi alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan di Kota madiun akan berpengaruh terhadap hasil produksi petani. Dinas pertanian tidak bisa melarang petani untuk tidak menjual lahan sawahnya, karena lahan sawah yang dimiliki petani itu bersifat individu atau milik pribadi. Di harapkan kedepannya Dinas pertanian dapat menekan alih fungsi lahan yang ada di Kota Madiun, sehingga pemberdayaan dan prosuktivitas petani tetap bisa berjalan dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani

###### a. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan program pembangunan pertanian perlu didukung dengan sumberdaya yang berkualitas. Hal ini terlihat dengan adanya penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani yang dilakukannya melalui pendekatan latihan dan kunjungan (LAKU). Peranan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan gabungan kelompok tani sudah dilakukan pemerintah kota madiun, yaitu dinas pertanian dengan baik. Gabungan kelompok tani mendapatkan latihan yaitu kursus yang diperuntukan bagi petani yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menerapkan teknologi.

###### b. Pembinaan Usaha

Pemerintah Kota Madiun telah berperan aktif dalam memberikan pembinaan usaha kepada gapoktan. Upaya yang dilakukan pemerintah kota madiun dalam hal pembinaan usaha yaitu diarahkan pada pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembang Usaha Agribisnis (BLM PUAP) yang diperoleh dari Kementerian Pertanian RI sebesar 100juta. Seperti Gapoktan Tani makmur yang mendapatkan dana

BLM PUAP pada tahun 2012. Dana BLM PUAP meberikan kemudahan bagi gapoktan karena dengan adanya bantuan tersebut gapoktan lebih diringankan dalam pembiayaan kebutuhan organisasi dan kegitan usaha taninya. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan oleh gapoktan untuk, pembelian pupuk, obat dan benih untuk meningkatkan hasil produksi pertaniaanya.

c. Pembinaan Lingkungan

Pemberdayaan Gapoktan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Madiun telah memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Peran Dinas Pertanian tersebut terlihat dengan adanya pemyuluhan dan penyadaran kepada petani agar tidak terus menerus meggunakan pupuk kimiawi karena akan merusak tekstur tanah yang nantinya dapat berakibat pada penurunan hasil panen. Dalam upaya melakukan pembinaan lingkungan, langkah yang dilakukan Dinas Pertanian dengan melakukan program pengelolaan hama terpadu (PHT). Dinas Pertanian juga meyarankan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia karena dapat merusak tanah dan lebih menekankan atau menganjurkan menggunakan pupuk organik pupuk kompos, selain itu juga mengajurkan penggunaan pestisida yang tepat seperti tepat sasaran dan tepat dosis.

d. Pembinaan Kelembagaan

Dinas Pertanian memiliki peran mendorong petani untuk memningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya dan mendorong poktan dan gapoktan untuk memningkatkan kapasitasnya

menjadi kelembagaan ekonomi petani. Pemberdayaan yang dilakukan dinas pertanian dalam hal pembinaan kelembagaan yaitu dengan mengarahkan poktan dan gapoktan untuk mengurus status Badan Hukum Indonesia ke kementerian hukum dan HAM RI melalui notaris yang ada dikota madiun. Gapoktan Tani makmur merupakan salah satu Gapoktan yang telah berbadan hukum dengan No. AHU 0026641.AH.01.07.TAHUN 2016 yang ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2016, hal ini di lakukan agar kedepannya organisasi yang telah berbadan hukum dapat lebih mudah dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah, legal dalam bekerja dan kuat dalam menyongsong perdagangan bebas ASEAN maupun dunia.

## 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan

### a. Faktor pendukung

- 1) Adanya Dukungan Yang Kuat Dari Pemerintah
- 2) Telah Terbentuknya Poktan Dan Gapoktan Di Kota Madiun

### b. Faktor penghambat

- 1) Sumber daya petani yang sebagaian masih berpendidikan rendah
- 2) Semakin berkurangnya luas lahan sawah

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang perlu diperhatikan mengenai peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani

1. Dinas pertanian Kota Madiun perlu memberikan perhatian lebih pada SDM gapoktan. Mengingat SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha pertanian. Dinas pertanian perlu memberikan penyuluhan dan pelatihan yang lebih intensif. Sebaiknya pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada Gapoktan dilakukan secara nyata/ praktek langsung dilahan sehingga petani yang usianya sudah uzur dapat menangkap informasi dari pelatihan tersebut secara mudah.
2. Areal sawah di Kota Madiun yang semakin menyempit perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mengingat sawah dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi warga Kota Madiun. Di harapkan kedepannya pemerintah mampu menekan alih fungsi lahan sawah dengan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan lingkungan hidup, juga dengan pemberian insentif dan subsidi kepada gapoktan agar kedepannya petani tetap mau untuk mempertahankan area sawahnya.



## DAFTAR PUSTAKA :

- Harijati, Sri. 2007. *Potensi dan Pengembangan Kompetensi Agribisnis Petani Berlahan Sempit*. IPB : Bogor.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat "Model" Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora Utama
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Sosial Dan Pemberdayaan : Teori Kebijakan Dan Penerapan*. Jakarta : CIDESS
- Mashoed.2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya : Papyrus
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani
- Pfiffner, Jonh M And Presthus, Robert V. 1960. *Public Administration*. New York: The Ronald Press Company.
- Rosenbloom, David H. And Robert S. Kravchuk. 2005. *Public Administration: Understanding Management, Politics, And Law In The Public Sector*, 6 Th Edition, New York: McGraw-Hill.
- Sa'adah, Nurus. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sadono, Dwi. 2008. *Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia*. Vol. 4 No 1. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Edisi revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Sjamsiar, Sjamsudin Indradi. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Agritek Pembangunan Nasional : Malang
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Cv. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*.Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan Daan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media
- Sumaryanto dan iqbal. Tanpa tahun. *Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dan dampak negatifnya*
- Syahyuti. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Pedesaan. *Analisis kebijakan pertanian*.volume 5 No.1-15-35
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Wahyuni, sri. 2003. *Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya*. Jurnal litbang pertanian, 22(1). Jakarta: pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian, kementerian pertanian republik indonesia.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.



## LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS PERTANIAN

1. Apa sajakah peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani?
2. Apa sajakah program dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani ?  
Apakah sudah terlaksana?
3. Bagaimanakah proses pemberdayaan gabungan kelompok tani?
4. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan sumberdaya manusia?
5. Apa saja yang di berikan dinas pertanian untuk mengembangkan kapasitas individu untuk petani?
6. Apa saja yang diberikan dinas pertanian untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan gabungan kelompok tani?
7. Apakah dinas pertanian berperan aktif dalam kelembagaan gabungan kelompok tani?
8. Apa saja yang di berikan dinas pertanian untuk mengembangkan kapsistas sitem/ jejaring pada gabungan kelompok tani?
9. Siapa saja yang berperan dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani?
10. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan usaha?
11. Apakah pemberdayaan gabungan kelompok tani menjadikan petani memiliki daya untuk mengembangkan pertaniannya?
12. Bagaimana gabungan kelompok tani mengelola hasil pertanian?
13. Bagaimana hasil pertanian dengan adanya gabungan kelompok tani setelah adanya pemberdayaan?
14. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan lingkungan?
15. Apakah dalam pembinaan lingkungan petani di ajarkan tentang pelestarian lingkungan?
16. Apa saja yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan?
17. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan kelembagaan?
18. Apakah ada tujuan yang akan dicapai yang membuat petani bekerjasama?
19. Di dalam organisasi gabungan kelompok tani apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi?
20. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan gapoktan?



**LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN UNTUK GABUNGAN KELOMPOK TANI**

1. Menurut bapak/ ibu Apakah dinas pertanian sudah/ belum berperan dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani?
2. Bapak/ ibu Apakah bisa menjelaskan program-program yang sudah diberikan dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani ? sudah terlaksana atau belum?
3. Apakah bapak/ibu sudah melaksanakan proses pemberdayaan gabungan kelompok tani? Apakah ada hambatan?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan sumberdaya manusia? Apakah sudah berperan aktif?
5. Apa saja yang di berikan dinas pertanian untuk mengembangkan kapasitas individu untuk petani pada gabungan kelompok tani?
6. Apa saja yang diberikan dinas pertanian untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan gabungan kelompok tani? Sudahkah berperan aktif?
7. Apa saja yang di berikan dinas pertanian untuk mengembangkan kapasitas sistem/ jejaring pada gabungan kelompok tani?
8. Apakah bapak/ ibu sudah aktif didalam pemberdayaan gabungan kelompok tani?
9. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan usaha?
10. Apakah pemberdayaan gabungan kelompok tani menjadikan petani memiliki daya untuk mengembangkan pertaniannya?
11. Bagaimana gabungan kelompok tani mengelola hasil pertanian?
12. Bagaimana hasil pertanian dengan adanya gabungan kelompok tani setelah adanya pemberdayaan?
13. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan lingkungan?
14. Apakah dalam pembinaan lingkungan petani di ajarkan tentang pelestarian lingkungan?
15. Apa saja yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan?
16. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pemberdayaan gabungan kelompok tani pada kegiatan pembinaan kelembagaan?
17. Apakah ada tujuan yang akan dicapai yang membuat petani bekerjasama?

18. Di dalam organisasi gabungan kelompok tani apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi?



repository.ub.ac.id

LAMPIRAN 3 : PENELITIAN SAAT MELAKUKAN OBSERVASI



Gambar 1: wawancara dengan bapak AH selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian Kota Madiun



Gambar 2: wawancara dengan ibu RN, sebagai penyuluh pendamping Gapoktan Tani Makmur



Gambar 3: wawancara dengan bapak SP sebagai Ketua Gapoktan Tani Makmur



Gambar 4: peneliti saat observasi di lahan sawah bersama bapak SP sebagai Ketua Gapoktan Tani Makmur



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

Nomor : 7453/UN.10.3/Pt/2016

Lampiran : -

Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pertanian Kota Madiun  
Balai Benih Ikan (BBI), Kelurahan Nambangan Lor  
Kota Madiun

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

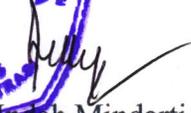
Nama : Lilik Nurhayati  
Alamat : Jalan Makumambang gang 1 no 1 Sogaten Madiun  
NIM : 125030107111052  
Jurusan : Administrasi Publik  
Tema : Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Gabungan  
Kelompok Tani  
Lamanya : Satu Bulan (6 Juni 2016 – 22 Juli 2016)  
Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 18 Mei 2016

a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Administrasi Publik



  
D. Lety Indah Mindarti, M. Si  
NIP. 19690524 200212 2 002



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137  
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153  
Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ ~~163~~ /401.203/2016

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
- b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 7493/UN.10.3/PG/2016 Perihal Riset/Survey

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LILIK NURHAYATI  
Tempat/tgl. Lahir : Denpasar, 09 Oktober 1993  
Alamat : Jl. Maskumambang Gg. 1 No.01 RT.009 RW.003 Sogaten Manguharjo Kota Madiun  
Judul Penelitian : Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan gabungan kelompok Tani  
Tujuan penelitian : Penyusunan Skripsi  
Tempat penelitian : Dinas Pertanian dan Gabungan Kelompok Tani Manguharjo Kota Madiun  
Waktu penelitian : 1 (satu) Bulan  
Bidang penelitian : Ekonomi  
Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswi S 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Anggota peneliti : -

- Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
  2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
  3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidak berlaku ;
  4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 24 Mei 2016

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN**

**BAMBANG SUBANTO, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Walikota Madiun  
(sebagai Laporan) ;
2. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya Malang.